

**PENYELENGGARAAN
PROGRAM HIBAH JALAN DAERAH (PHJD)
&
PROVINCIAL ROAD IMPROVEMENT MAINTENANCE
(PRIM)
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**TAHUN
2019-2023**



**PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2024**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) merupakan salah satu mekanisme pembiayaan infrastruktur jalan melalui skema hibah untuk mengurangi gap pembiayaan penanganan jalan daerah

BAB I PENDAHULUAN

1

- Latar Belakang
- Gambaran Umum
- Dasar Hukum
- Lingkup Kegiatan
- Mekanisme Kegiatan

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

12

- PHJD/PRIM FASE I TAHUN 2019 - 2021
- PHJD/PRIM FASE II TAHUN 2020-2022
- PHJD FASE III TAHUN 2021-2023

BAB III DAMPAK PHJD BAGI PEMERINTAH DAERAH

48

Dampak PHJD pada Komponen Teknis dan Non-Teknis

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

60

Pada sub-bab ini dijelaskan terkait evaluasi dari masing-masing tahap sejak dilaksanakannya PHJD di tahun 2019 hingga 2023.



KATA PENGANTAR

Pembangunan sektor jalan merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional. Pada tahun 2019, proporsi panjang jalan daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) mencakup 90% panjang seluruh jaringan jalan di Indonesia. Dengan proporsi yang cukup besar tersebut, terdapat tantangan dan kendala yang dihadapi pemerintah dalam mewujudkan target pembangunan sektor jalan antara lain: (i) Penanganan jalan daerah melalui APBD lebih memprioritaskan pada prioritas daerah dan tidak sejalan dengan prioritas nasional; dan (ii) Penanganan jalan yang belum berkualitas dan berkelanjutan serta kualitas jalan daerah yang masih terbilang rendah dengan kondisi mantap baru mencapai 74% jalan provinsi dan 62% jalan Kabupaten/Kota (Aplikasi Sistem Pengelolaan Database Jalan Daerah, 2019).

Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) merupakan salah satu mekanisme pembiayaan infrastruktur jalan melalui skema hibah untuk mengurangi gap pembiayaan penanganan jalan daerah. Program tersebut difokuskan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah utamanya di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Pada mulanya program tersebut merupakan pilot program peningkatan tata kelola dan penyelenggaraan jalan daerah melalui Program *Provincial Road Improvement and Maintenance* (PRIM) dengan pilot project di Provinsi Nusa Tenggara Barat - NTB (2013-2019) dan Kabupaten Lombok Barat (2017-2019).

Mengacu pada Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.PL.02.04-Mn/89 Tanggal 25 Januari 2018 tentang Usulan Program Hibah Jalan Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Sekretaris Jenderal, yang membawahi Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID), berinisiasi untuk mendorong agar kesuksesan PRIM di Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Barat diterapkan juga di wilayah lain. Pada Tahun 2019- 2023 telah diperoleh daerah penerima PHJD yang terdiri dari 9 Provinsi dan 14 Kabupaten. Pemerintah daerah penerima terbagi atas tiga fase yaitu fase pertama pada Tahun 2019-2021, fase kedua pada Tahun 2020-2022 dan fase ketiga pada Tahun 2021-2023.

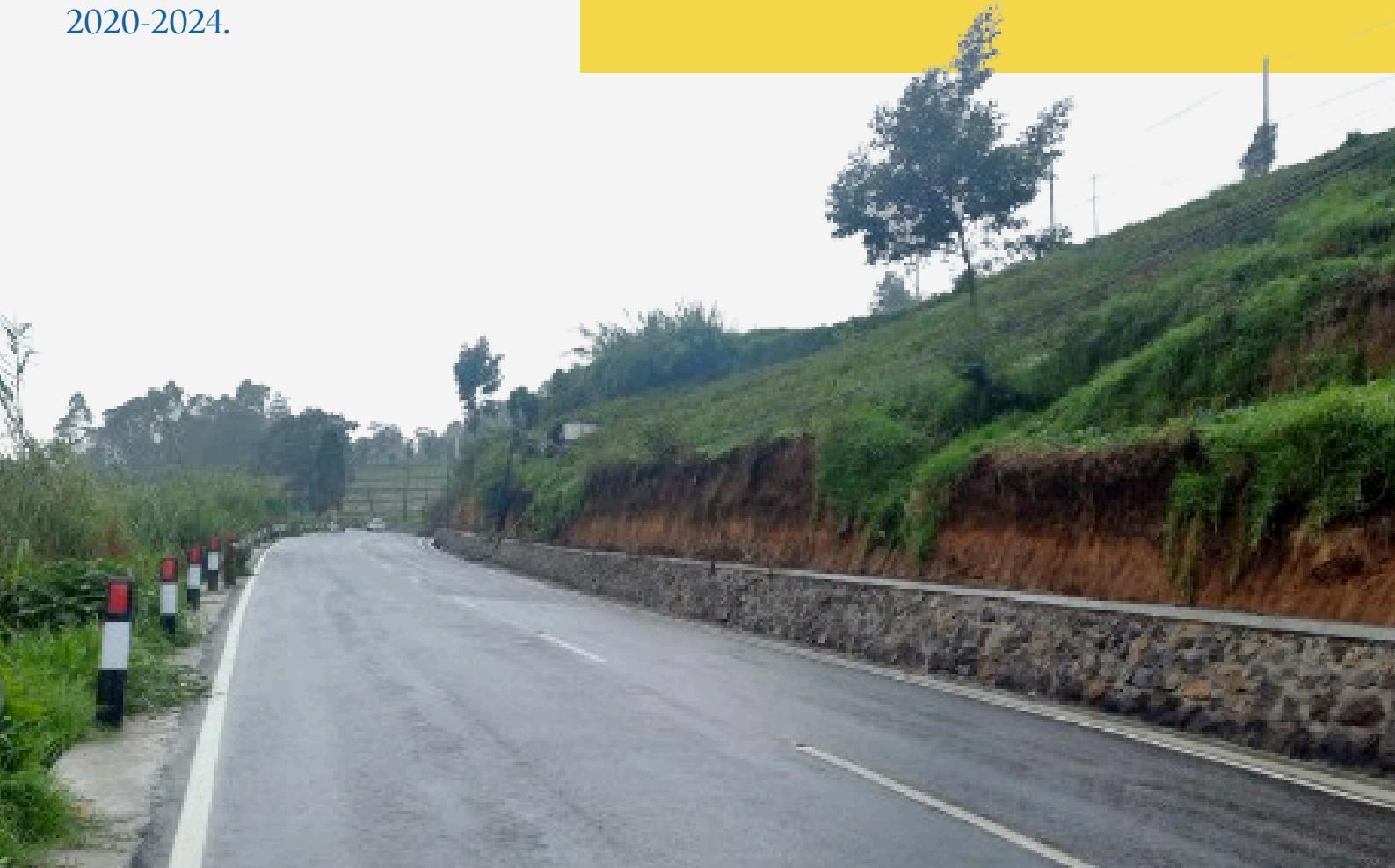
Laporan Hasil PHJD 2019-2023 ini dimaksudkan sebagai upaya pembelajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian target kondisi mantap jalan, meningkatkan sistem dan prosedur perencanaan pemrograman dan pembiayaan (PPP), meningkatkan kualitas proses pengadaan serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dan transparansi untuk kualitas pekerjaan. Demikian laporan ini kami susun, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak

Jakarta, 31 Mei 2024
Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah

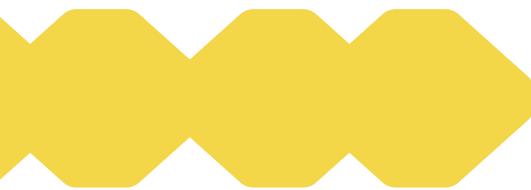
BAB I

PENDAHULUAN

Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) sebagai salah satu strategi untuk mencapai target kemantapan jalan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.



LATAR BELAKANG



Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) sebagai salah satu strategi untuk mencapai target kemantapan jalan daerah dengan menggunakan skema pendanaan cost sharing (pembagian pembiayaan) dan reimbursement (penggantian) dengan dana bersumber dari APBN (Rupiah murni). Secara khusus PHJD bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah termasuk di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSN) dengan pendampingan teknis secara intensif agar memenuhi aspek good governance (tata kelola) dan quality assurance (kendali mutu).

Dalam rangka peningkatan tata kelola penyelenggaraan jalan daerah, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan dukungan dari Pemerintah Australia telah melakukan pilot program melalui Program Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat - NTB (2013-2019) dan Kabupaten Lombok Barat (2017-2019) dengan hasil yang memuaskan dari sisi fisik, kemampuan teknis SDM, manajemen, dan keterlibatan masyarakat.



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Sekretaris Jenderal Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID), berinisiasi untuk mendorong agar kesuksesan PRIM di Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Barat untuk dapat diterapkan juga di wilayah lain terutama pada KSPN melalui Program Hibah Jalan Daerah (PHJD).

Program ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola penyelenggaraan jalan daerah, integrasi antar-hirarki jalan, kualitas pelayanan dan kinerja jaringan jalan, kapasitas institusi dan sumber daya manusia, serta mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk meningkatkan alokasi dana pada sektor jalan terutama pada pemeliharaan jalan.

GAMBARAN UMUM

Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) adalah pemberian hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang bersumber dari APBN Rupiah murni yang dikelola oleh Tim PHJD yang terdiri dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang mendapatkan dana hibah perlu membentuk tim Project Implementation Unit (PIU) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan program di masing-masing wilayahnya.

Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam program PHJD/PRIM, antara lain:

- Peningkatan sistem dan prosedur perencanaan, pemrograman dan pembiayaan, melalui Provincial/Kabupaten Road Management System (P/KRMS)
- Peningkatan kualitas kemampuan proses pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan penerapan sistem e-katalog untuk jenis pekerjaan pemeliharaan rutin jalan
- Peningkatan keterlibatan masyarakat dan transparansi untuk kualitas pekerjaan pemeliharaan jalan, peningkatan peran Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) dalam kegiatan-kegiatan pemeliharaan jalan, penanganan keluhan/masukan masyarakat, dan penerapan kesetaraan gender dan keterlibatan kaum marginal, misalnya kelompok disabilitas, dan lain-lain.



DASAR HUKUM

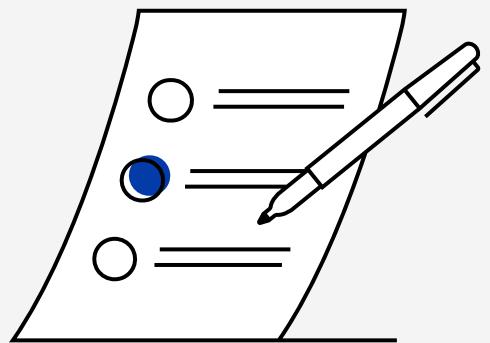
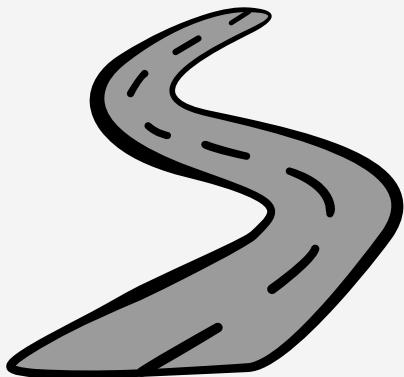


Dasar hukum pelaksanaan Program PHJD

- | | | |
|--|---|--|
| 1
Undang-undang tentang APBN | 9
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | 15
Peraturan Menteri PUPR No. 16 Tahun 2020 Organisasi dan tata kerja UPT |
| 2
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | 10
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat | 16
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 1/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan |
| 3
Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak | 11
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 | 17
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2020 tentang Akses Disabilitas Terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan Bencana |
| 4
Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas | 12
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia | 18
Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik |
| 5
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan | 13
Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah | 19
Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia |
| 6
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | 14
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan No. 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR | |
| 7
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah | | |
| 8
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | | |

LINGKUP KEGIATAN

Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) & Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) tahun 2019 - 2023 memiliki tujuan diantaranya :



1
MENINGKATKAN
KONEKTIVITAS BERBASIS
KORIDOR DI KAWASAN
STRATEGIS PARIWISATA
(KSPN)

2
MENINGKATKAN
KONEKTIVITAS BERBASIS
KORIDOR DI KAWASAN
STRATEGIS PARIWISATA
(KSPN)

3
MENINGKATKAN TATA
KELOLA
PENYELENGGARAAN JALAN
DAERAH (VALUE FOR
MONEY)
UNTUK MENDUKUNG
PERBAIKAN AKSESIBILITAS
PADA DAERAH YANG
DIPRIORITASKAN

Adapun lingkup kegiatan yang dibiayai dengan dana hibah PHJD & PRIM terdiri dari:

A. KEGIATAN FISIK

- Pemeliharaan rutin jalan termasuk Backlog and Minor Works (BMW)/Rutin Kondisi, Penunjangan/Holding Treatment;
- Pemeliharaan berkala jalan;
- Rehabilitasi dan peningkatan jalan.



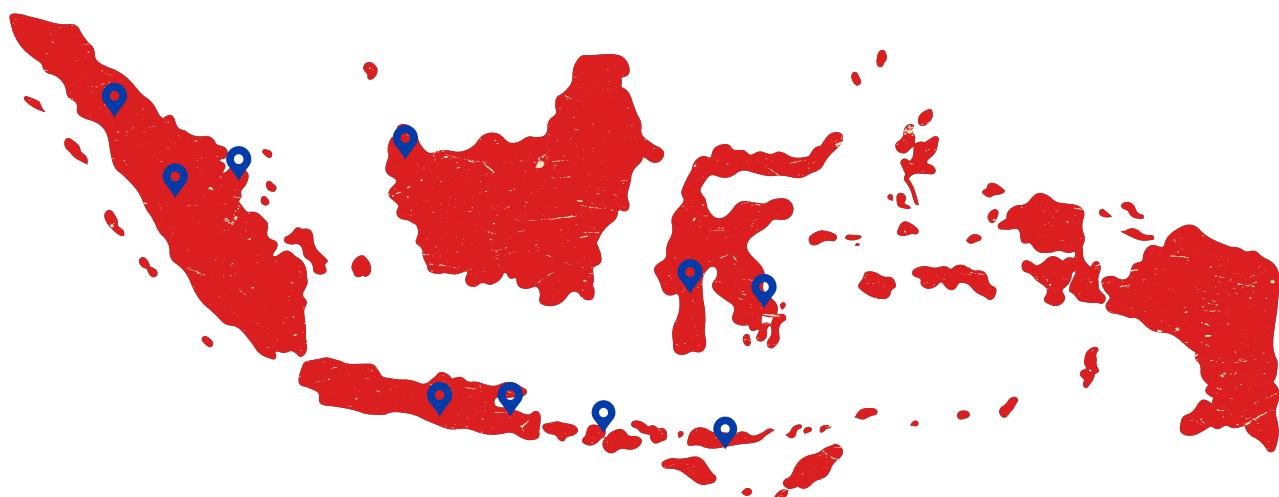
B. KEGIATAN NON-FISIK



- Peningkatan kepedulian atas isu keselamatan dan kesehatan kerja (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja/SMK3);
- Peningkatan pemenuhan kriteria jalan yang berkeselamatan;
- Peningkatan kapasitas penyelenggara jalan (Dinas PU/Bina Marga, Bappeda, dan instansi terkait lainnya) termasuk penyedia jasa;
- Peningkatan tata kelola melalui kerjasama dan partisipasi pemangku kepentingan, misalnya pembentukan dan peningkatan peran Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ), Pokdarwis, Simpul Pengetahuan Jalan Daerah (SPJD); termasuk penerapan prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam kegiatan pengelolaan jalan, dll.

LINGKUP KEGIATAN

Program PHJD/PRIM memberikan Hibah kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) khususnya pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)



PHJD/PRIM FASE I (2019–2021)

- **KSPN TANJUNG KELAYANG** : PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG & KABUPATEN BELITUNG
- **KSPN BROMO-TENGGER SEMERU (BTS)** : PROVINSI JAWA TIMUR, KABUPATEN MALANG, KABUPATEN PASURUAN, & KABUPATEN LUMAJANG
- **KSPN WAKATOBI** : PROVINSI SULAWESI TENGGARA & KABUPATEN WAKATOBI
- **KSPN LABUAN BAJO** : PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR & KABUPATEN MANGGARAI BARAT

PHJD/PRIM FASE II (2020–2022)

- **KSPN MANDEH** : PROVINSI SUMATERA BARAT & KABUPATEN PESISIR SELATAN
- **KSPN TORAJA** : PROVINSI SULAWESI SELATAN, KABUPATEN TANA TORAJA, & KABUPATEN TORAJA UTARA
- **KSPN BROMO-TENGGER-SEMERU (BTS)** : KABUPATEN PROBOLINGGO

PHJD/PRIM FASE III (2021–2023)

- **KSPN DANAU TOBA** : PROVINSI SUMATERA UTARA, KABUPATEN SIMALUNGUN & KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
- **KSPN BOROBUDUR** : PROVINSI JAWA TENGAH & KABUPATEN WONOSOBO
- **KSPN SAMBAS** : PROVINSI KALIMANTAN BARAT & KABUPATEN SAMBAS

Pemilihan lokasi PHJD/PRIM merujuk pada ketentuan sebagai berikut :

A

KRITERIA UMUM

- Termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) dengan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah misal melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
- Kepala Daerah mengajukan Surat Minat dan bersedia mengikuti persyaratan program;
- Tidak ada masalah dengan pembebasan lahan;
- Tidak ada isu lingkungan dan sosial;
- Menyatakan kesiapan untuk menanggung seluruh pembiayaan terlebih dahulu (pre-financing) guna pelaksanaan kegiatan hibah, yaitu peningkatan kinerja institusi dan pemeliharaan jalan (kegiatan fisik);
- FLLAJ sudah terbentuk atau dalam proses pembentukan

B

KRITERIA KHUSUS

- Tingkat kemantapan jalan;
- Performa Pemerintah Provinsi/Kabupaten sesuai dengan parameter yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri);
- Tingkat investasi Pemerintah Provinsi/Kabupaten untuk sektor jalan yang dilihat dari jumlah alokasi APBD untuk sektor jalan minimal dalam kurun waktu 3 tahun terakhir;
- Jumlah masyarakat miskin;
- Persentase jalan sub-standard;
- Ketersediaan data jaringan dan status jalan;
- Ketersediaan sumber daya manusia dengan latar belakang teknik sesuai kebutuhan bagi kegiatan penyelenggaraan jalan;
- Adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mencakup sektor jalan untuk memastikan bahwa proses penganggaran untuk program ini dapat dialokasikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- Memiliki fasilitas teknis yang mendukung kegiatan pengelolaan jalan, misalnya laboratorium, peralatan survey, dll;
- Adanya mekanisme untuk memastikan kualitas yang sesuai standar yang ditetapkan (Quality Assurance – QA), misalnya sudah memiliki standar ISO, dll;
- Upaya Pemerintah daerah dalam mendorong peran serta masyarakat;
- Ketersediaan data lalu lintas tentang waktu tempuh;
- Pelengkap jalan (road furniture);
- Adanya laman (website) resmi Pemerintah Provinsi/Kabupaten;
- Adanya data yang mendukung bahwa Pemerintah Provinsi/Kabupaten memiliki potensi untuk bertumbuh, misalnya untuk KSPN tersedia data potensi pertumbuhan pariwisata dari sisi 3A (Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi), jumlah wisatawan, dll;
- Pengalaman ikut serta dalam program hibah jalan.

Dalam penyelenggaraannya pada tingkat pemerintah pusat terdapat 6 kementerian yang terlibat langsung dalam PHJD/PRIM, yaitu:



Kementerian PPN/Bappenas, memiliki peran berperan dalam tingkat kebijakan untuk memastikan bahwa PHJD dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana program yang telah disepakati dalam kaitannya dengan sinkronisasi program lain yang bertujuan memastikan penanganan konektivitas kawasan berbasis koridor di KSN dapat dilakukan secara menyeluruh.



Kementerian Perhubungan, sebagai pembina teknis sektor transportasi, termasuk Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ), baik di tingkat pusat maupun daerah yang berfungsi mengkoordinasikan semua hal yang terkait dengan keselamatan transportasi dengan semua unit kerja terkait.



Kementerian Dalam Negeri, berperan untuk sinkronisasi kegiatan atau program lain di daerah sehingga tercipta sinergi yang kondusif untuk mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintah Provinsi/Kabupaten secara optimal.



Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berperan dalam proses penentuan lokasi dan aspek pendukung terkait aksesibilitas, atraksi, dan amenitas tujuan wisata yang memiliki nilai manfaat/ekonomis yang paling signifikan terhadap peningkatan potensi pendapatan daerah dan pembinaan komunitas/masyarakat di daerah penerima hibah PHJD.

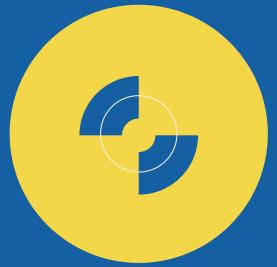


Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, melaksanakan manajemen dan mekanisme hibah termasuk pencantuman dana hibah di dokumen anggaran belanja/keuangan serta sebagai benda hara dalam penyaluran (disbursement) hibah kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten penerima hibah (Implementing Agency). Perihal koordinasi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dapat memberikan bantuan atau advokasi tentang pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten dalam hal yang berkaitan dengan pembiayaan pendahuluan untuk PHJD.



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada Unit Organisasi Sekretariat Jenderal sebagai Executing Agency mempunyai kewenangan untuk melakukan persiapan dan manajemen program; verifikasi teknis dan memonitor kegiatan pelaksanaan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Jenderal berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai pembina teknis. Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) dibawah Sekretariat Jenderal PUPR bertugas sebagai pelaksana harian Executing Agency. Pada Unit Organisasi Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai pembina teknis sektor jalan yang mempunyai peran dalam menentukan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) sebagai referensi dalam pelaksanaan kegiatan.

MEKANISME KEGIATAN



Mekanisme yang digunakan dalam Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) dan Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) adalah sebagai berikut :

A. MEKANISME PELAKSANAAN

Pada tahapan tersebut pemerintah pusat menetapkan kebijakan penanganan jalan di wilayah Kawasan Strategis Nasional (KSN) serta kebijakan seleksi daerah penerima PHJD. Setelah ditetapkannya daerah penerima PHJD, Kementerian Keuangan melalui DIrektorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dan dokumen Perjanjian Hibah Daerah (PHD).

Tahapan berikutnya pemerintah daerah mengalokasikan dalam APBD kegiatan PHJD yang meliputi kegiatan fisik, penyiapan readiness criteria, pengawasan kegiatan fisik serta kegiatan pengembangan institusi. Setelahnya pemerintah daerah dapat melakukan proses pengadaan barang dan jasa serta mengajukan verifikasi kepada tim teknis (pemerintah pusat).

B. MEKANISME VERIFIKASI

Dinas PU dibantu oleh Konsultan Pendamping melakukan pengawasan terhadap hasil pekerjaan konsultan supervisi dan melakukan evaluasi/review atas hasil laporan kemajuan pekerjaan secara periodik. Konsultan Verifikasi melakukan Penilaian Teknis (Technical Assessment) sebelum dilakukan Pra-Verifikasi. Hasil pekerjaan kontraktor diharuskan memenuhi persyaratan sesuai spesifikasi dan kualitas. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko pekerjaan ditolak pada saat tahap verifikasi pekerjaan oleh Tim Teknis yang akan berakibat terhadap jumlah hibah yang bisa dicairkan (penggantian/reimbursement).

Konsultan Verifikasi sebelum melakukan pra-verifikasi akan melakukan Penilaian Teknis dan pengadaan/tender untuk semua kontrak di dalam PHJD. Penggantian/penyaluran hibah dilaksanakan berdasarkan hasil keluaran yang terukur (output) atas pekerjaan konstruksi yang telah selesai dengan persyaratan sesuai yang tertuang dalam Manual Manajemen Program.

Verifikasi dilakukan untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria yang ditentukan sebagai dasar perhitungan nilai pencairan dana hibah. Verifikasi pekerjaan atas pelaksanaan program hibah tahun 2019-2023 untuk hibah ke provinsi dan kabupaten. Verifikasi ini dilaksanakan secara independen dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan. Verifikasi dilakukan dalam tiga tahap selama tahun anggaran berjalan yaitu:

VERIFIKASI PHJD/PRIM TAHAP I

Dilaksanakan pada bulan Maret-April dengan pencairan dana setinggi-tingginya 15% dari nilai hibah. Pemenuhan output insentif institusi pada tahap ini diverifikasi dan mempengaruhi saran pencairan insentif institusi di Tahap II.



VERIFIKASI PHJD/PRIM TAHAP II

Dilaksanakan pada bulan Juli dengan pencairan dana hibah setinggi-tingginya sesuai pengeluaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan pencairan setinggi-tingginya 50% dari insentif institusi.



VERIFIKASI PHJD/PRIM TAHAP III

Dilaksanakan pada bulan November dengan pencairan dana hibah setinggi-tingginya sesuai sisa dana hibah dan pencairan setinggi-tingginya 50% insentif institusi.

C. MEKANISME PERMINTAAN PENCAIRAN DANA HIBAH

Pasca proses verifikasi selesai Provinsi/Kabupaten menerima hasil verifikasi dan surat rekomendasi teknis dari Tim Teknis maksimum dalam 14 hari kerja setelah Tim Teknis melakukan verifikasi di lapangan dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten memenuhi semua rekomendasi atau masukan dari Tim Teknis. Selanjutnya pemerintah Provinsi/Kabupaten mengajukan pencairan hibah kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dengan melengkapi persyaratan persyaratan sesuai yang tertuang dalam Manual Manajemen Program.

D. MEKANISME PENCAIRAN/PENYALURAN DANA HIBAH

Tata cara penyaluran dana hibah PHJD dilakukan melalui mekanisme APBN dan APBD dan diatur dalam PHD, sesuai dengan PP No.2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan PMK 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, atau peraturan terkait yang berlaku

E. MEKANISME PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Mekanisme pelaporan, pemantauan evaluasi hibah dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam PHD dan sesuai peraturan perundang-undangan terkait hibah daerah dan tata cara penyaluran hibah kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten.

Pemerintah Provinsi/Kabupaten penerima hibah melakukan pelaporan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan secara triwulan sebagaimana diatur dalam PHD ditembuskan kepada Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas, Sekjen Kementerian PUPR, Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri, Deputi Pengembangan Destinasi Kemenparekraf. DJPK c.q. Direktorat Dana Transfer Khusus dan/atau Setjen Kementerian PUPR melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana hibah yang dilakukan Pemerintah Provinsi/Kabupaten. Selain itu, Tim Teknis melakukan pemantauan pada waktu-waktu tertentu.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

PHJD sebagai suatu upaya percepatan pencapaian target kondisi jalan mantap di Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan mendukung pengembangan Kawasan Startegis Pariwisata Nasional (KSPN)



PHJD/PRIM FASE I TAHUN 2019–2021

2.1.1 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (KSPN) TANJUNG KELAYANG

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Kelayang merupakan satu-satu major project Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2024-2024. KSPN Tanjung Kelayang merupakan salah satu obyek wisata pantai yang terdapat di wilayah Kecamatan Sijuk. Tempat ini selalu menjadi tujuan favorit wisatawan. Jarak Tanjung Kelayang dari Pusat Kota Tanjungpandan 27 km, ada hal yang menarik dari pantai ini yaitu, tampak dengan jelas ditengah laut batu Kepala Burung Garuda, merupakan maskot Pantai Tanjung Kelayang berikut keanekaragaman letak posisi batu yang terkesan unik dan menarik. Setiap tahun pada bulan Oktober pantai Tanjung Kelayang dijadikan pusat titik labuh kapal layar para yachter yang tergabung dalam kegiatan Sail Indonesia.

Potensi pariwisata ini menjadikan Tanjung Kelayang terpilih sebagai salah satu KSPN PHJD yang diikuti oleh :

1. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Kabupaten Belitung



KSPN Tanjung Kelayang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

A. PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan alokasi Tahun 2019 Rp 86.102.000.000, Tahun 2020 Rp 83.805.000.000, Tahun 2021 Rp 74.858.800.000, alokasi tersebut sesuai dengan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Kementerian Keuangan yang setiap tiga tahun diterima oleh pemerintah daerah.

Adapun ruas jalan yang dikerjakan melalui Program Hibah Jalan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu :

- Jalan Junction – Membalong;
- Jalan Perawas – Buding;
- Jalan Dalam Kota Tanjungpandan;
- Jalan Tanjungpandan – Simpang Empat (Sijuk).

Berdasarkan hasil pelaksanaan pekerjaan Program Hibah Jalan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diperoleh hasil kinerja 2019 – 2021 adalah sebagai berikut :

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung							
Tahun	Keuangan			Fisik			Pemenuhan Ouput Institusi (%)
	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Presentase Realisasi (%)	Target (Km)	Realisasi (Km)	Presentase Realisasi (%)	
2019	Rp86.102	Rp84.649	98%	121	134,86	111%	97,6%
2020	Rp83.805	Rp64.193	77%	87	87	100%	92%
2021	Rp74.858	Rp62.862	84%	107,8	77,35	72%	86%
Total	Rp244.765	Rp211.704	86%	315,8	299,21	94%	91,9%

*) Target dan realisasi fisik terdiri atas pekerjaan:

- Pemeliharaan Rutin;
- Pemeliharaan Berkala ;
- Rehabilitasi, dan;
- Pelebaran.



B. KABUPATEN BELITUNG

Kabupaten Belitung mendapatkan alokasi Tahun 2019 Rp 37.574.000.000, Tahun 2020 Rp 29.200.484.000, Tahun 2021 Rp 39.585.620.000, alokasi tersebut sesuai dengan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Kementerian Keuangan yang setiap tiga tahun diterima oleh pemerintah daerah.

Adapun ruas jalan yang dikerjakan melalui Program Hibah Jalan Daerah di Kabupaten Belitung, yaitu :

- Jalan Simpang IV Sijuk – Sungai Padang;
- Jalan Padang Kandis – Batu Lubang;
- Jalan Buluh Tumbang – Air Seru.

Berdasarkan hasil pelaksanaan pekerjaan Program Hibah Jalan Daerah di Kabupaten Belitung, diperoleh hasil kinerja 2019 – 2021 adalah sebagai berikut :

Kabupaten Belitung							
Tahun	Keuangan			Fisik			Pemenuhan Ouput Institusi (%)
	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Presentase Realisasi (%)	Target (Km)	Realisasi (Km)	Presentase Realisasi (%)	
2019	Rp37.574	Rp37.515	99,8%	73	108	148%	98,3%
2020	Rp29.200	Rp29.030	99,4%	99	99	100%	93,3%
2021	Rp39.585	Rp39.262	99,2%	109	109	100%	90,6%
Total	Rp106.359	Rp105.807	99%	281	316	116%	94,1%

*) Target dan realisasi fisik terdiri atas pekerjaan:

- Pemeliharaan Rutin;
- Pemeliharaan Berkala ;
- Rehabilitasi, dan;
- Pelebaran.



PHJD/PRIM FASE I TAHUN 2019-2021

2.1.2 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (KSPN) BROMO TENGGER-SEMERU (BTS)

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo Tengger Semeru merupakan satu-satu major project Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2024-2024. Gunung Bromo (2.329 dpl), adalah salah satu gunung dari beberapa gunung lainnya yang terhampar di kawasan kompleks pegunungan Tengger. Salah satu daya tarik Gunung Bromo yang istimewa adalah kawah ditengah kawah dengan lautan pasirnya yang membentang luas di sekeliling kawah Bromo yang sampai saat ini masih terlihat mengepulkan asap putih setiap saat, menandakan gunung ini masih aktif. Akses menuju KSPN Bromo dari Bandar Udara Juanda ditempuh kurang lebih 61 Km.

Potensi pariwisata ini menjadikan Bromo-Tengger-Semeru terpilih sebagai salah satu KSPN PHJD/PRIM yang diikuti oleh :

- Provinsi Jawa Timur
- Kabupaten Pasuruan
- Kabupaten Malang
- Kabupaten Lumajang
- Kabupaten Probolinggo (PRIM)



A. PROVINSI JAWA TIMUR

Sebagai daerah penerima Program Hibah Jalan Daerah, Provinsi Jawa Timur mendapatkan alokasi Tahun 2019 Rp 108.000.000.000, Tahun 2020 Rp 70.693.337.000, Tahun 2021 Rp 122.665.960.000, alokasi tersebut sesuai dengan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Kementerian Keuangan yang setiap tiga tahun diterima oleh pemerintah daerah. Adapun ruas jalan yang dikerjakan melalui Program Hibah Jalan Daerah di Provinsi Jawa Timur, yaitu :

- Jalan Kejayan - Tosari;
- Jalan Kejayan - Purwosari;
- Jalan Purwodadi – Nongkojajar;
- Jalan Pandaan – Trete;
- Jalan Mahakam;
- Jalan Lumajang – Bts. Kota Jember;
- Jalan Karanglo – Bts. Kota Batu;
- Jalan Bts. Kota Malang – Turen;
- Jalan Letjen. Panjaitan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan pekerjaan Program Hibah Jalan Daerah di Provinsi Jawa Timur, diperoleh hasil kinerja 2019 – 2021 adalah sebagai berikut :

Provinsi Jawa Timur							
Tahun	Keuangan			Fisik			Pemenuhan Ouput Institusi (%)
	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Presentase Realisasi (%)	Target (Km)	Realisasi (Km)	Presentase Realisasi (%)	
2019	Rp108.000	Rp77.183	71%	170	128,43	76%	88,6%
2020	Rp70.693	Rp65.188	92%	174,25	174,25	100%	82%
2021	Rp122.665	Rp105.524	86%	166,57	166,57	100%	88,3%
Total	Rp301.358	Rp247.895	83%	510,82	469,25	92%	86,3%

*) Target dan realisasi fisik terdiri atas pekerjaan:

- Pemeliharaan Rutin;
- Pemeliharaan Berkala ;
- Rehabilitasi, dan;
- Pelebaran.



B. KABUPATEN MALANG



Kabupaten Malang mendapatkan alokasi PHJD Tahun 2019 Rp 38.658.000.000, Tahun 2020 Rp 26.070.625.000, Tahun 2021 Rp 35.182.400.000, alokasi tersebut sesuai dengan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Kementerian Keuangan yang setiap tiga tahun diterima oleh pemerintah daerah. Adapun ruas jalan yang dikerjakan melalui Program Hibah Jalan Daerah di Kabupaten Malang, yaitu :

- Jalan Tulusbesar - Ngadas;
- Jalan Tumpang Wonomulyo;
- Jalan Asrikaton Bandara Abd.Rachman Saleh;
- Jalan Mangliawan – Tumpang;
- Jalan Buringkidal – Tumpang;
- Jalan Kedungrejo – Tumpang;
- Jalan Pandanajeng – Slamet;
- Jalan Wonomulyo – Ngingit.

Berdasarkan hasil pelaksanaan pekerjaan Program Hibah Jalan Daerah di Kabupaten Malang, diperoleh hasil kinerja 2019 – 2021 adalah sebagai berikut

Tahun	Kabupaten Malang						Pemenuhan Ouput Institusi (%)
	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Presentase Realisasi (%)	Target (Km)	Realisasi (Km)	Presentase Realisasi (%)	
2019	Rp38.658	Rp18.155	47%	88	72,1	82%	85,6%
2020	Rp26.070	Rp25.542	98%	82,19	82,19	100%	90%
2021	Rp35.182	Rp34.936	99%	98,14	98,14	100%	91,6%
Total	Rp99.910	Rp78.633	81%	268,33	252,43	94%	89,1%

*) Target dan realisasi fisik terdiri atas pekerjaan:

- Pemeliharaan Rutin;
- Pemeliharaan Berkala ;
- Rehabilitasi, dan;
- Pelebaran.

C. KABUPATEN PASURUAN

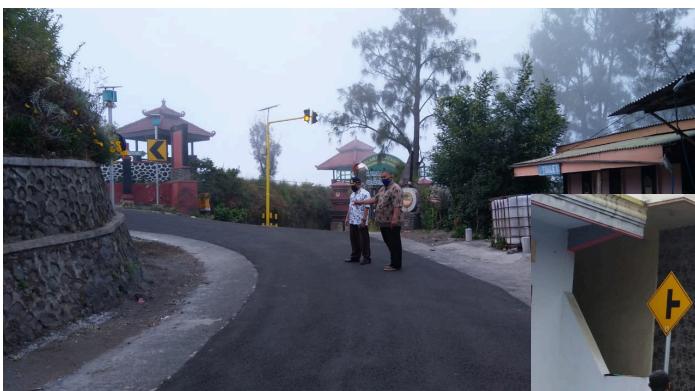
Kabupaten Pasuruan mendapatkan alokasi PHJD Tahun 2019 Rp 34.236.000.000, Tahun 2020 Rp 21.253.523.000, Tahun 2021 Rp 33.165.000.000, alokasi tersebut sesuai dengan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Kementerian Keuangan yang setiap tiga tahun diterima oleh pemerintah daerah. Adapun ruas jalan yang dikerjakan melalui Program Hibah Jalan Daerah di Kabupaten Pasuruan, diantaranya :

- Jalan Dingklik - Penanjakan
- Jalan Dingklik – Lautan Pasir
- Jalan Pasar Wonokitri – Pendopo Agung
- Jalan Wonokitri - Sedaeng
- Jalan Tosari - Podokoyo
- Jalan Wonokitri - Podokoyo
- Jalan Ngadirejo - Podokoyo
- Jalan Ngadiwono - Wonomerto
- Jalan Cangkringmalang - Ngempit
- Jalan Gununggangsir - Talun
- Jalan Gondanglegi - Randupitu
- Jalan Bangil - Wonokerto
- Jalan Sidogiri - Kanigoro
- Jalan Blimbingsari - Pajaran
- Jalan Pleret - Dhompo
- Jalan Warungdowo - Ngempit
- Jalan Wonorejo - Wrati
- Jalan Nongkojajar – Tlogosari Bodo
- Jalan Sukorejo - Kenduruan
- Jalan Pandaan – Randupitu
- Jalan Wrati - Kedemungan
- Jalan Wonokitri - Dingklik
- Jalan Puspa - Kemiri
- Jalan Nongkojajar - Ngadirejo
- Jalan Martopura - Semut
- Jalan Gerbo – Rejopasang
- Jalan Tosari – Ngadiwono
- Jalan Tosari - Baledono

Kabupaten Pasuruan							
Tahun	Keuangan			Fisik			Pemenuhan Ouput Institusi (%)
	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Presentase Realisasi (%)	Target (Km)	Realisasi (Km)	Presentase Realisasi (%)	
2019	Rp34.236	Rp26.027	76%	173	106,25	61%	70,0%
2020	Rp21.253	Rp20.687	97%	135,92	135,92	100%	80%
2021	Rp33.165	Rp24.895	75%	99,21	99,21	100%	86,6%
Total	Rp88.654	Rp71.609	83%	408,13	341,38	87%	78,9%

*) Target dan realisasi fisik terdiri atas pekerjaan:

- Pemeliharaan Rutin;
- Pemeliharaan Berkala ;
- Rehabilitasi, dan;
- Pelebaran.



D. KABUPATEN LUMAJANG

Kabupaten Lumajang mendapatkan alokasi PHJD Tahun 2019 Rp 42.141.000.000. alokasi tersebut sesuai dengan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Kementerian Keuangan yang diterima oleh pemerintah daerah. Pada akhir tahun 2019 pemerintah daerah Kabupaten Lumajang mundur dari Program Hibah Jalan Daerah karena berkaitan dengan keuangan daerah. Adapun ruas jalan yang dikerjakan melalui Program Hibah Jalan Daerah di Kabupaten Lumajang, diantaranya :

- Jalan Semeru;
- Jalan Banjarwatu – Karanganom;
- Jalan Karanganom – Senduro;
- Jalan Sari Kemuning - Pegawon;
- Jalan Pagowan – Jambearum

- Jalan Kandangan – Wonokerto;
- Jalan Wonokerto – Gucialit;
- Jalan Bondang – Wonokerto;
- Jalan Dwan Lor – Bodang;
- Jalan Tempeh Lor – Kedungmoro.

Berdasarkan hasil pelaksanaan pekerjaan Program Hibah Jalan Daerah di Kabupaten Lumajang, diperoleh hasil kinerja 2019 adalah sebagai berikut* :

Kabupaten Lumajang							
Tahun	Keuangan			Fisik			Pemenuhan Ouput Institusi (%)
	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Presentase Realisasi (%)	Target (Km)	Realisasi (Km)		
2019	Rp42.141	Rp21.827	52%	82	92,37	113%	96,5%

*) Target dan realisasi fisik terdiri atas pekerjaan:

- Pemeliharaan Rutin;
- Pemeliharaan Berkala ;
- Rehabilitasi, dan;
- Pelebaran.



*Kabupaten Lumajang mengundurkan diri di tahun 2019, oleh karena itu pelaksanaan PHJD hanya berlangsung pada tahun pertama alokasi

E. KABUPATEN PROBOLINGGO

Kabupaten Probolinggo mendapatkan alokasi PHJD Tahun 2019 Rp 16.500.000.000, Tahun 2020 Rp 31.850.000.000, Tahun 2021 Rp 14.150.000.000, alokasi tersebut sesuai dengan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Kementerian Keuangan yang setiap tiga tahun diterima oleh pemerintah daerah. Adapun ruas jalan yang dikerjakan melalui Program Hibah Jalan Daerah di Kabupaten Probolinggo, yaitu :

- Jalan Tongas – Lumbang;
- Jalan Lumbang – Lumbang Kuning;
- Jalan Lumbang – Madakaripura;
- Jalan Ngadisari – Cemoro Lawang;
- Jalan Ngadisari – Laut Pasir;
- Jalan Sukapura – Lambang Kuning;
- Jalan Sukapura – Ngadisari

Berdasarkan hasil pelaksanaan pekerjaan Program Hibah Jalan Daerah di Kabupaten Probolinggo, diperoleh hasil kinerja 2019 – 2021 adalah sebagai berikut :

Tahun	Keuangan			Fisik			Pemenuhan Ouput Institusi (%)
	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Presentase Realisasi (%)	Target (Km)	Realisasi (Km)	Presentase Realisasi (%)	
2019	Rp16.500	Rp14.990	91%	124,8	124,8	100,0%	97,6%
2020	Rp31.850	Rp28.741	90%	86,32	86,32	100%	91,6%
2021	Rp14.150	Rp10.450	74%	86,07	84,62	98,3%	90,6%
2022	Rp15.300	Rp9.634	63%	104,84	97,20	92,71%	79%
Total	Rp62.500	Rp54.181	85%	297,19	295,74	99%	91,1%

*) Target dan realisasi fisik terdiri atas pekerjaan:

- Pemeliharaan Rutin;
- Pemeliharaan Berkala ;
- Rehabilitasi, dan;
- Pelebaran.



PHJD/PRIM FASE I TAHUN 2019-2021

2.1.3 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (KSPN) WAKATOBI

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Kelayang merupakan satu-satu major project Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. KSPN Wakatobi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang beribukota di Wangi-Wangi. Sejak tahun 1996, Wakatobi telah ditetapkan sebagai taman nasional Indonesia dan cagar alam dunia untuk biosfer laut oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Nama Wakatobi merupakan akronim dari empat pulau utamanya yaitu WAngi-Wangi, KAledupa, TOmia, dan BIInongko. Selain keempat pulau tersebut, terdapat beberapa pulau kecil lain yang berada di wilayah Wakatobi, antara lain Pulau Hoga, Kapota, Anano dan Rundumana. Wakatobi telah lama menjadi primadona bagi para penyelam dari seluruh dunia karena keindahan alam bawah lautnya. Tidak kurang dari 942 spesies ikan dan 750 spesies karang tercatat menghuni wilayah perairan Wakatobi.

Potensi pariwisata ini menjadikan Wakatobi terpilih sebagai salah satu KSPN PHJD yang diikuti oleh :

- Provinsi Sulawesi Tenggara
- Kabupaten Wakatobi



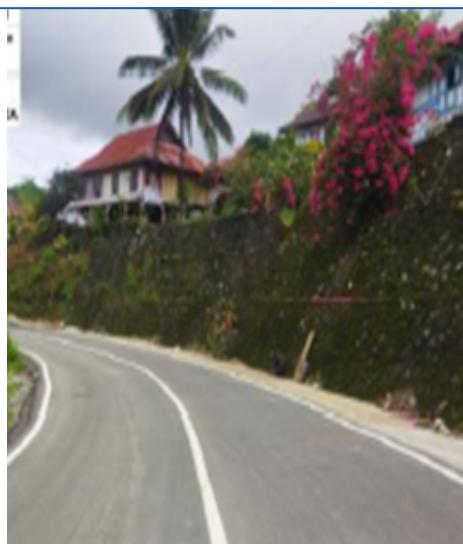
A. PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Sebagai daerah penerima Program Hibah Jalan Daerah, Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan alokasi Tahun 2019 Rp 81.134.000.000, Tahun 2020 Rp 73.873.250.000, Tahun 2021 Rp 39.639.050.000, alokasi tersebut sesuai dengan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Kementerian Keuangan yang setiap tiga tahun diterima oleh pemerintah daerah. Adapun ruas jalan yang dikerjakan melalui Program Hibah Jalan Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu:

- Jalan Wanci – Komala – Bandara Matahora;
- Jalan Lagadi – Bts Mubar/Kab. Muna;
- Jalan Bts. Kota Bau Bau/Kab. Busel – Batauga;
- Jalan H. Lamuse;
- Jalan Orinunggu;
- Jalan Pangeran Antasari;
- Jalan Dewi Sartika;
- Jalan Batu Gong-Bts Kab. Konawe/Kota Kendari (Labibia)
- Jalan Bts. Kab. Konawe/Kota Kendari
(Labibia)-Dr. Sutomo)
- Jalan Kamaru – Lawele;
- Jalan Dayanu Ichannuddin-Lawela (Bts.
Kota Bau Bau/Kab. Busel);
- Jalan Batauga-Sampolawa;
- Jalan Sampolawa-Kaongke Ongkea);
- Jalan Motaha – Lambuya.

Berdasarkan hasil pelaksanaan pekerjaan Program Hibah Jalan Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara, diperoleh hasil kinerja 2019 – 2021 adalah sebagai berikut :

Provinsi Sulawesi Tenggara							
Tahun	Keuangan			Fisik			Pemenuhan Ouput Institusi (%)
	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Presentase Realisasi (%)	Target (Km)	Realisasi (Km)	Presentase Realisasi (%)	
2019	Rp81.134	Rp76.406	94%	67	48,93	73%	96%
2020	Rp73.873	Rp73.054	99%	96,36	96,36	100%	88%
2021	Rp39.639	Rp35.069	88%	132,16	132,16	100%	83%
Total	Rp194.646	Rp184.529	94%	295,52	277,45	91,01%	89%



B. KABUPATEN WAKATOBI

Kabupaten Wakatobi memiliki luas wilayah 473,62 Kilometer persegi dengan batas wilayah sebelah barat dengan Laut Flores, Kabupaten Buton, batas Timur dengan Laut Banda, batas Utara dengan Laut Banda dan batas selatan yaitu Laut Flores. Sebagai daerah penerima Program Hibah Jalan Daerah, Kabupaten Wakatobi mendapatkan alokasi Tahun 2019 Rp 29.172.000.000, Tahun 2020 Rp 27.645.080.000, Tahun 2021 Rp 37.132.820.000, alokasi tersebut sesuai dengan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Kementerian Keuangan yang setiap tiga tahun diterima oleh pemerintah daerah. Adapun ruas jalan yang dikerjakan melalui Program Hibah Jalan Daerah di Kabupaten Wakatobi, yaitu:

- Jalan Pulau Tomia;
- Jalan Pupu;
- Jalan Padaraya Makmur;
- Jalan Yos Sudarso;
- Jalan Gansauri;
- Jalan Gangsalangi;
- Jalan La Ode Lalangi;
- Jalan Wungka Barakati;
- Jalan Syech Abd. Rahma
- Jalan Wa Bue Bue.

Berdasarkan hasil pelaksanaan pekerjaan Program Hibah Jalan Daerah di Kabupaten Wakatobi, diperoleh hasil kinerja 2019 – 2021 adalah sebagai berikut

Kabupaten Wakatobi							
Tahun	Keuangan			Fisik			Pemenuhan Ouput Institusi (%)
	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Presentase Realisasi (%)	Target (Km)	Realisasi (Km)	Presentase Realisasi (%)	
2019	Rp29.172	Rp25.591	88%	38	25,89	68%	100%
2020	Rp27.645	Rp27.193	98%	41,97	41,81	99,62%	80,6%
2021	Rp37.132	Rp32.169	87%	41,03	41,02	99,98%	78,6%
Total	Rp93.949	Rp84.953	91%	121	108,72	89,24%	86,4%

c) Target dan realisasi fisik terdiri atas pekerjaan:

- Pemeliharaan Rutin;
- Pemeliharaan Berkala ;
- Rehabilitasi, dan;
- Pelebaran.



PHJD/PRIM FASE I

TAHUN 2019-2021

2.1.3 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (KSPN) LABUAN BAJO



Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo merupakan satu-satu major project Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. KSPN Labuan Bajo merupakan salah satu yang menjadi kekuatan dari kota Labuan Bajo adalah keberadaan kawasan Taman Nasional Komodo yang telah dijadikan sebagai obyek wisata kelas dunia, dimana Labuan Bajo merupakan entry point untuk menuju Kawasan wisata. Selain memiliki potensi wisata bahari, tersedia juga pariwisata darat yang cukup banyak, diantaranya berbagai gua alam dengan kekhasannya sendiri, mata air dan air terjun yang letaknya tidak jauh dari kawasan Labuan Bajo.

Potensi pariwisata ini menjadikan Labuan Bajo terpilih sebagai salah satu KSPN PHJD yang diikuti oleh :

- Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Kabupaten Manggarai Barat

A. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan alokasi PHJD Tahun 2019 Rp 23.706.000.000, Tahun 2020 Rp 82.978.500.000, Tahun 2021 Rp 73.482.300.000, alokasi tersebut sesuai dengan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Kementerian Keuangan yang setiap tiga tahun diterima oleh pemerintah daerah. Adapun ruas jalan yang dikerjakan melalui Program Hibah Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu:

- Jalan Penunjang KSPN Komodo;
- Jalan Sp. Noa – Golowelu (Bts. Kab);

Berdasarkan hasil pelaksanaan pekerjaan Program Hibah Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperoleh hasil kinerja 2019 – 2021 adalah sebagai berikut:

Tahun	Provinsi Nusa Tenggara Timur						Pemenuhan Ouput Institusi (%)	
	Keuangan			Fisik				
	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Presentase Realisasi (%)	Target (Km)	Realisasi (Km)	Presentase Realisasi (%)		
2019	Rp23.706	Rp19.415	82%	72	75,67	105%	100%	
2020	Rp82.978	Rp70.581	85%	33,6	31,12	92,62%	86,3%	
2021	Rp73.482	Rp63.880	87%	68	65,2	95,88%	95,6%	
Total	Rp180.166	Rp153.876	85%	173,6	171,99	97,87%	93,97%	

*) Target dan realisasi fisik terdiri atas pekerjaan:

- Pemeliharaan Rutin;
- Pemeliharaan Berkala ;
- Rehabilitasi, dan;
- Pelebaran.



B. KABUPATEN MANGGARAI BARAT

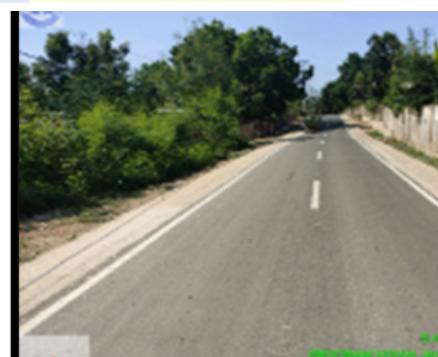


Kabupaten Manggarai Barat mendapatkan alokasi PHJD Tahun 2019 Rp 19.277.000.000, Tahun 2020 Rp 26.115.540.000, Tahun 2021 Rp 24.287.450.000, alokasi tersebut sesuai dengan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Kementerian Keuangan yang setiap tiga tahun diterima oleh pemerintah daerah. Adapun ruas jalan yang dikerjakan melalui Program Hibah Jalan Daerah di Kabupaten Manggarai Barat, yaitu:

- Langkakabe – Patung Caci – SMIP;
- Perijinan – Gua Maria Golo Koe;
- Tk. Ade Irma – Wae Kesambi;
- Nggorang – Benteng – Lemes;
- Wae Mata – Paroki Roh Kudus;
- Lapangan Wae Kesambi – Sp. RPH – Katentang.

Berdasarkan hasil pelaksanaan pekerjaan Program Hibah Jalan Daerah di Kabupaten Manggarai Barat, diperoleh hasil kinerja 2019 – 2021 adalah sebagai berikut:

Tahun	Keuangan			Fisik			Pemenuhan Ouput Institusi (%)
	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Presentase Realisasi (%)	Target (Km)	Realisasi (Km)	Presentase Realisasi (%)	
2019	Rp19.277	Rp17.854	93%	42	42,64	101,52%	100%
2020	Rp26.115	Rp19.946	76%	29	29	100%	77%
2021	Rp24.287	Rp22.979	95%	28,23	27,7	98,12%	93%
Total	Rp69.679	Rp60.779	88%	99,23	99,34	99,88%	90%

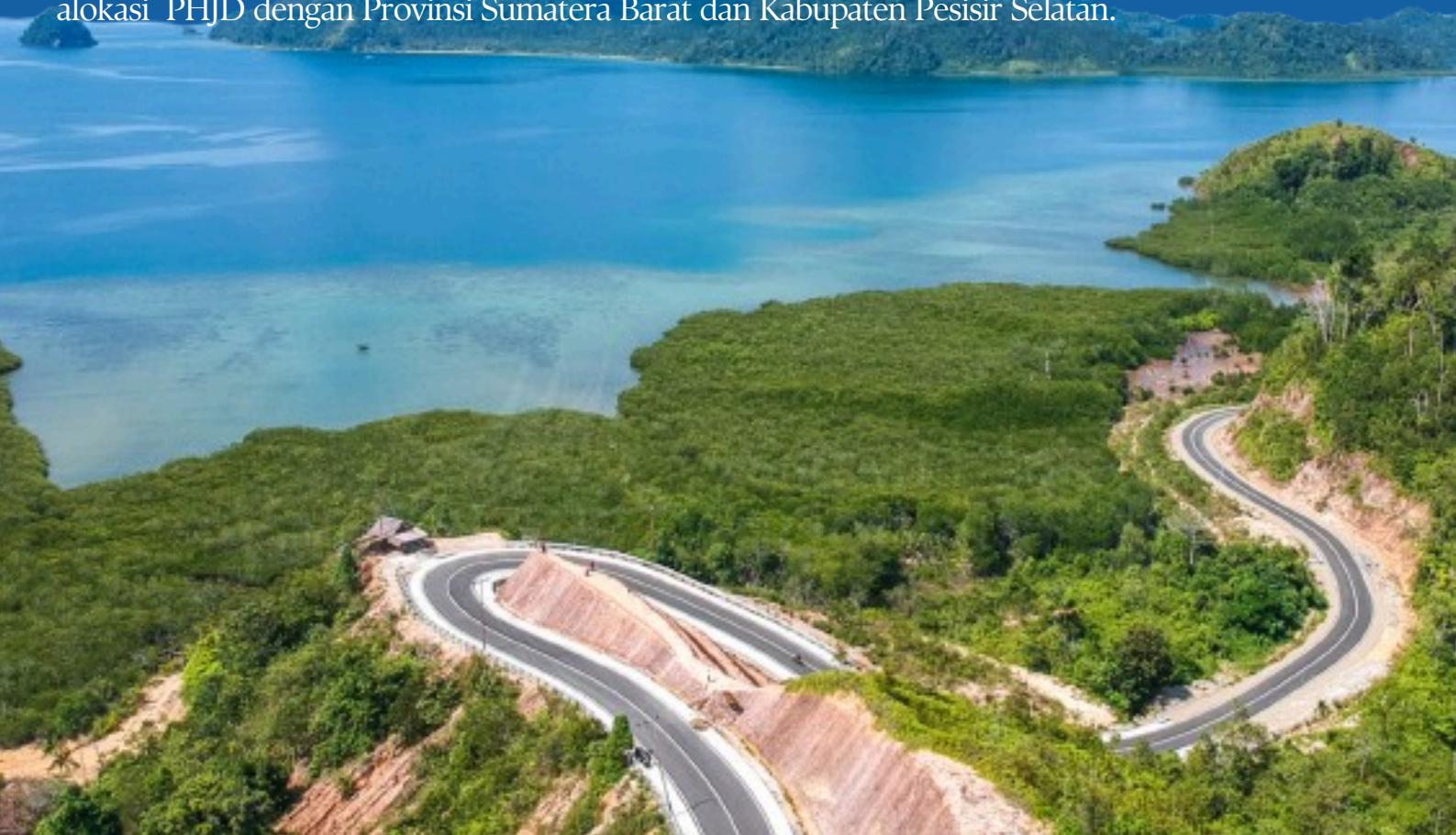


2.2 PHJD/PRIM FASE II TAHUN 2020 – 2022

2.2.1 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandeh

Mandeh adalah kawasan wisata yang terletak di Kecamatan Koto XI Tarusan yang berbatas langsung dengan Kota Padang. Kawasan ini hanya berjarak 56 KM dari Padang dengan luas 18.000 ha dan waktu tempuh 56 menit. Kawasan Wisata Mandeh melingkupi 7 kampung di 3 nagari. Objek wisata Kawasan Mandeh sudah dikenal baik dalam tingkat nasional maupun internasional, bahkan sudah menjadi destinasi utama kebijakan sektor pariwisata kebaharian dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPNAS). Komponen pariwisata di Kawasan Mandeh termasuk lengkap, mulai dari pantai, air terjun dan hutan mangrove.

Akan tetapi akses ke lokasi didominasi oleh kapal karena ruas jalan yang sempit dan berkelok, untuk itu perlu perhatian pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur di kawasan ini. Pemerintah pusat selanjutnya menindaklanjuti dengan memasukkan Kawasan Mandeh dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan selanjutnya menerbitkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Startegis Nasional. Berdasarkan potensi dan urgensi tersebut, Kawasan Mandeh atau Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandeh terpilih menjadi salah satu lokasi penerima alokasi PHJD dengan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan.



A. PROVINSI SUMATERA BARAT

Sebagai daerah penerima PHJD, pemerintah pusat telah mengeluarkan alokasi untuk Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 48.095.392.000 untuk tahun 2020, Rp 56.331.200.000 untuk tahun 2022, dan Rp 64.509.000.000 untuk tahun 2023. Alokasi tersebut sesuai dengan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Kementerian Keuangan yang setiap tiga tahun diterima oleh pemerintah daerah.

Adapun ruas jalan yang dikerjakan melalui Program Hibah Jalan Daerah di Provinsi Sumatera Barat, yaitu

- Jalan Surantih-Kayu Aro-Langgai
- Jalan Pasar Baru-Alahan Panjang;
- Jalan Teluk Kabung-Mandeh-Tarusan;
- Jalan Taluk Bayur-Nipah-Purus;
- Jalan Batu Batembak-Pelabuhan Panasahan;
- Jalan Solok-Alahan Panjang;
- Simp.Duku (Ketaping)-Pariaman.

Berdasarkan hasil pelaksanaan pekerjaan Program Hibah Jalan Daerah di Provinsi Sumatera Barat, diperoleh hasil kinerja 2020-2022 adalah sebagai berikut :

Provinsi Sumatera Barat							
Tahun	Keuangan			Fisik			Pemenuhan Ouput Institusi (%)
	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Presentase Realisasi (%)	Target (Km)	Realisasi (Km)	Presentase Realisasi (%)	
2020	Rp48.095	Rp45.772	95%	105,72	101,28	95,8%	93%
2021	Rp56.331	Rp51.221	91%	170,20	170,20	100%	83%
2022	Rp64.509	Rp61.528	95%	238,02	227,02	95,38%	93%
Total	Rp.168.935	Rp.158.521	94%	513,94	498,50	97%	89,6%

) Target dan realisasi fisik terdiri atas pekerjaan:

- Pemeliharaan Rutin;
- Pemeliharaan Berkala ;
- Rehabilitasi, dan;
- Pelebaran.



Gambar 2.19 Foto Dokumentasi Pekerjaan PHJD di Provinsi Sumatera Barat

B. KABUPATEN PESISIR SELATAN

Sebagai salah satu wilayah yang mendukung Kawasan Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan terpilih menjadi salah satu daerah penerima alokasi Program Hibah Jalan Daerah (PHJD). Pemerintah pusat telah mengeluarkan alokasi sebesar Rp 26.600.457.000 di tahun 2020, Rp30.621.600.000 di tahun 2021, dan Rp.27.837.000.000 di tahun 2022. Alokasi tersebut sesuai dengan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Kementerian Keuangan yang setiap tiga tahun diterima oleh pemerintah daerah. Adapun ruas jalan yang dikerjakan melalui Program Hibah Jalan Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu

- Jalan Karang Sago-Kp Baru
- Jalan Rawang 1-Sekitarnya
- Jalan Simp.Koto-Painan Timur
- Jalan Bukit Putus-Carocok Koto
- Jalan Bukit Putus Painan Timur
- Jalan Pincuran Boga-Painan Timur
- Jalan Simpang Mesjid Duku-Cumateh
- Jalan Simpang Kampung Jawa-Simpang Ampera
- Jalan Simpang Tiga-Kantor Lurah
- Jalan Darwis-Sekitarnya
- Jalan Koto Baru dan sekitarnya
- Jalan Simp.SMK Tarusan Bukit Batu Patah
- Jalan Ampang Pulai-Pulau Karam
- Jalan Pincuran Boga-Painan Timur
- Jalan Salido-Carocok Painan
- Jalan Simp.Ampang Pulai-Batu Kalang
- Jalan Bukit Putus 1-Painan Timur
- Jalan Pemuda-TMP Painan
- Jalan Salido-Carocok Painan
- Jalan Kapuh-API-APi
- Jalan Cumateh-Kampung Sawah
- Jalan Sei Talang-Gurun Panjang
- Jalan Gurung Panjang-Kapuh
- Jalan Pasar Minggu-Duku
- Jalan Pasar Barung Belantai-Simp.Kelok
- Jalan Sp.Talaao-Sp.Tsanawiyah
- Jalan SMA Kapuh-Bukit Sabai Nan Aluih
- Jalan Talaok-Gurun Panjang
- Jalan Lubuk Anau-Sp Ambacang
- Jalan Ganting-Talaok
- Jalan Talaok-Air Jambak
- Jalan Pasar Baru-Pasar Baru Inpres
- Jalan Salido-Sianik
- Jalan Tarusan-Sungai Tawar
- Jalan Sei.Tawar-Teluk Raya
- Jalan Tarusan-Simp. Anau
- Jalan Simp.Ampang Pulau Batu Kalang
- Jalan Bukit Langkisau

Berdasarkan hasil pelaksanaan pekerjaan Program Hibah Jalan Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan, diperoleh hasil kinerja 2020-2022 adalah sebagai berikut :

Kabupaten Pesisir Selatan							
Tahun	Keuangan			Fisik			Pemenuhan Ouput Institusi (%)
	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Presentase Realisasi (%)	Target (Km)	Realisasi (Km)	Presentase Realisasi (%)	
2020	Rp26.600	Rp26.366	99%	74,99	74,99	100%	94%
2021	Rp30.621	Rp30.375	99%	46,30	46,30	100%	94%
2022	Rp27.837	Rp25.019	90%	56,07	50,39	89,88%	89%
Total	Rp.85.058	Rp.81.760	96%	177,36	171,68	97%	92,3%

*) Target dan realisasi fisik terdiri atas pekerjaan:

- Pemeliharaan Rutin;
- Pemeliharaan Berkala ;
- Rehabilitasi, dan;
- Pelebaran.



2.2 PHJD/PRIM FASE II TAHUN 2020 – 2022

2.2.2 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Toraja

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang terbesar dan tercepat pertumbuhannya di dunia, selain sebagai penggerak ekonomi di wilayah, pariwisata juga memberikan kesempatan untuk memperluas kesempatan kerja masyarakat. Pemerintah Indonesia secara fokus mengelola pembangunan pariwisata di daerah dengan membentuk beberapa Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), khususnya untuk membuka peluang pariwisata non-Bali seperti Toraja. KSPN Toraja adalah sebuah area yang terletak di Sulawesi Selatan dan memiliki kekhasan budaya yang menarik attensi wisatawan lokal maupun internasional seperti destinasi wisata Pallawa (perumahan adat toraja), Londa (pemakaman gua), Batutumonga (tugu warisan zaman megalithikum), Lemo (pemakaman batu) dan destinasi lainnya. Selain kekhasan budaya yang dimiliki, Toraja juga menyimpan panorama alam yang memukau.

Pemerintah Indonesia menindaklanjuti potensi yang dimiliki oleh Toraja dengan menetapkan Kawasan Toraja sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang termaktub dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 56 Tahun 2018. Penetapan ini bertujuan untuk mendukung potensi pariwisata yang dimiliki dengan dukungan non-fisik maupun fisik seperti infrastruktur. Salah satu komponen infrastruktur dasar yang dapat mendorong pertumbuhan angka wisatawan adalah infrastruktur jalan. Untuk itu, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR membuat skema pembiayaan infrastruktur yaitu Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) yang bertujuan meningkatkan kemantapan jalan daerah khususnya di daerah KSPN. Adapun KSPN Toraja didukung oleh tiga daerah yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara, ketiga daerah ini selanjutnya menjadi daerah penerima alokasi PHJD Fase II Tahun 2020-2022.



A. PROVINSI SULAWESI SELATAN

Sebagai salah satu daerah penopang KSPN Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2020 menerima alokasi PHJD sebesar Rp.50.496.938.000 di tahun 2020, Rp.57.431.000.000 di tahun 2021, dan Rp.77.534.000.000 di tahun 2022. Alokasi tersebut sesuai dengan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Kementerian Keuangan yang setiap tiga tahun diterima oleh pemerintah daerah. Adapun ruas jalan yang dikerjakan melalui Program Hibah Jalan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu

- Jalan Jalan Batupapan-Bandara Pongtiku Alang Alang (Ma'dandan) - Rantepao
- Jalan Tedong Bonga-Batas Kabupaten Luwu Utara
- Jalan Batu Papan – Bandara Pongtiku – Alang alang – Madandan - Rantepao
- Jalan Rantepao – Sa'dan – Bts. Kab. Luwu
- Jalan Passobo - Matangli - Massupu
- Jalan Rantepao-Pangala-Baruppu-Batas Sulbar
- Jalan Rantepao – Panggala – Baruppu – Bts. Sulbar
- Jalan Bts Kab, Luwu – Tedong Bonga
- Jalan Batupapan Bandara Pongtiku - Bts. Toraja Utara
- Jalan Bts. Kab. Enrekang - Mebalii

Provinsi Sulawesi Selatan							
Tahun	Keuangan			Fisik			Pemenuhan Ouput Institusi (%)
	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Presentase Realisasi (%)	Target (Km)	Realisasi (Km)	Presentase Realisasi (%)	
2020	Rp50.496	Rp49.830	99%	79,00	79,00	100%	91%
2021	Rp57.431	Rp54.031	94%	50,00	50,00	100%	91%
2022	Rp77.534	Rp8.813	11%	118,16	13,49	11,42%	67%
Total	Rp.185.461	Rp.112.674	68%	247,16	142,49	70%	83%

*) Target dan realisasi fisik terdiri atas pekerjaan:

- Pemeliharaan Rutin;
- Pemeliharaan Berkala ;
- Rehabilitasi, dan;
- Pelebaran.



B. KABUPATEN TANA TORAJA

Potensi pariwisata yang dimiliki oleh Tana Toraja ini kemudian mendorong wilayah ini terpilih menjadi salah satu pendukung KSPN Toraja yang mendapatkan alokasi PHJD. Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana PHJD sebesar Rp.31.824.155.000 di tahun 2020, Rp.29.596.300.000 di tahun 2021, dan Rp.34.965.000.000 di tahun 2022. Alokasi tersebut sesuai dengan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Kementerian Keuangan yang setiap tiga tahun diterima oleh pemerintah daerah. Adapun ruas jalan yang dikerjakan melalui Program Hibah Jalan Daerah di Kabupaten Tana Toraja, yaitu

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| ·Jalan Rantelemo - Tilangnga | ·Jalan Lemo - Rorre |
| ·Jalan Kea'tang - Kalimbuang | ·Jalan Kalimbuang - Tilangnga |
| ·Jalan Tetebassi - Kondoran | ·Jalan Tondok Iring - Lea |
| ·Jalan Kia'tang - Batupapan | ·Jalan Palangka - Surruk |
| ·Jalan Kendenan - Palangka | ·Jalan Ba'ru - Mangggau |
| ·Jalan Paku - Pangleon | ·Jalan Botang - Lapandan |
| ·Jalan Makale - Sapandeata | ·Jalan Botang Lapandan |
| ·Jalan Lapandan - Tarongko | ·Jalan Kiatang -Batupapan |
| ·Jalan Makale - Kondoran | ·Jalan Kendenan - Palangka |
| ·Jalan Makale - Lapandan | ·Jalan Kondoran - Makula |
| ·Jalan Tokalimbuang - Tilangnga | ·Jalan Kiatang - Kalimbuang |
| ·Jalan To'kalimbuang - Tilangnga | ·Jalan Dalam Kota Sangalla |
| ·Jalan Kiatang Batupapan | ·Jalan Lapandan - Tarongko |
| ·Jalan Lemo - Rorre | ·Jalan Kaduaja - Pa'buaran |
| ·Jalan Sillanan - Ra'pu Pa'buaran | ·Jalan Maulu - Pangdo |
| ·Jalan Kondoran - Makula | |

Kabupaten Tana Toraja							
Tahun	Keuangan			Fisik			Pemenuhan Ouput Institusi (%)
	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Presentase Realisasi (%)	Target (Km)	Realisasi (Km)	Presentase Realisasi (%)	
2020	Rp31.824	Rp19.135	99%	57,83	34,52	59,70%	66%
2021	Rp29.596	Rp28.101	95%	75,40	75,40	100%	74%
2022	Rp34.965	Rp21.662	62%	109,94	68,11	61,95%	68%
Total	Rp.96.385	Rp.68.898	85%	243,17	178,03	74%	69,33%

*) Target dan realisasi fisik terdiri atas pekerjaan:

- Pemeliharaan Rutin;
- Pemeliharaan Berkala ;
- Rehabilitasi, dan;
- Pelebaran.



C. KABUPATEN TORAJA UTARA

Potensi pariwisata yang dimiliki oleh Toraja Utara menjadikan wilayah ini termasuk satu dari tiga daerah pendukung KSPN Toraja yang menerima alokasi PHJD Fase II. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR telah mengeluarkan alokasi sebesar Rp.31.350.000.000 di tahun 2020, Rp. 26.020.500.000 di tahun 2021, dan Rp. 37.838.000.000 di tahun 2022. Alokasi tersebut sesuai dengan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Kementerian Keuangan yang setiap tiga tahun diterima oleh pemerintah daerah. Adapun ruas jalan yang dikerjakan melalui Program Hibah Jalan Daerah di Kabupaten Toraja Utara, yaitu

- Jalan Karasiak-Lempe
- Jalan Lempe-Ke'pe
- Jalan To'rea-To'dama
- Jalan To'Dama-Pangli
- Jalan Ke'pe-Parinding
- Jalan Tikala-Batutumonga
- Jalan Bai-Deri
- Jalan Alang-alang-Londa
- Jalan Angin-angin-Londa
- Jalan Pa'besenan-Londa
- Jalan Ba'tan-Angin-Angin
- Jalan Tombang Kalua'-Bokin

- Jalan Barana'-Pangli
- Jalan Sarambu-Karua
- Jalan Lolai-Pongtorra dan Pontorra-Ke'pe
- Jalan Karasiak-Ke'pe
- Jalan Kapolang-Dende
- Jalan Langda-Pasang
- Jalan Malakiri-Karua
- Jalan Sarambu-Karua
- Jalan Pongtorra'-Lolai
- Jalan Karasiak-Ke'pe
- Jalan Batutumonga-To'rea
- Jalan Pangli-Batutumonga

Berdasarkan hasil pelaksanaan pekerjaan Program Hibah Jalan Daerah di Kabupaten Toraja Utara, diperoleh hasil kinerja 2020-2022 adalah sebagai berikut :

Tahun	Kabupaten Toraja Utara						Pemenuhan Opuput Institusi (%)
	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Presentase Realisasi (%)	Target (Km)	Realisasi (Km)	Presentase Realisasi (%)	
2020	Rp31.350	Rp11.314	36%	69,54	22,53	32,40%	72%
2021	Rp26.020	Rp24.987	96%	61,91	61,91	100%	77%
2022	Rp37.838	Rp36.914	98%	78,41	76,50	97,56%	73%
Total	Rp.95.208	Rp.73.215	77%	209,86	160,94	77%	74%

*) Target dan realisasi fisik terdiri atas pekerjaan:
• Pemeliharaan Rutin;
• Pemeliharaan Berkala ;
• Rehabilitasi, dan;
• Pelebaran.



2.2 PHJD/PRIM FASE II TAHUN 2020 – 2022

2.2.3 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo Tengger-Semeru (BTS)

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) merupakan kawasan wisata alam di Jawa Timur yang secara administratif berada di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Probolinggo yang telah ditetapkan sejak tahun 1982. Pada TNBTS terdapat sejumlah cagar alam, taman wisata, hutan, dan gunung berapi seperti Cagar Alam Laut Pasir Tengger, Cagar Alam Ranu Kumbolo, Taman Wisata Ranu Pani-Ranu Regulo, Taman Wisata Tengger Laut Pasir, Gunung Batok, Gunung Kursi, Gunung Watangan, dan lainnya. Selain kekayaan flora, fauna, dan ekologi, TNBTS memiliki kekayaan budaya yang luar biasa yaitu adat istiadat Suku Tengger. Berbagai kekayaan flora, fauna, dan keunikan budaya tersebut Kawasan Wisata Bromo Tengger Semeru ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang dikembangkan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan Perpres 18/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, TNBTS secara resmi ditetapkan sebagai salah satu “Bali Baru” yang dikembangkan dalam program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Dengan status KSPN, pemerintah pusat secara terpadu membangun dan mengembangkan pariwisata di kawasan tersebut dari segala sisi, termasuk dari sisi infrastruktur dasar. Kementerian PUPR bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pariwisata menetapkan KSPN Bromo-Tengger-Semeru (BTS) sebagai salah satu daerah penerima alokasi Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi jalan yang menuju dan ke kawasan pariwisata Bromo Tengger Semeru.



PRIM KABUPATEN PROBOLINGGO

Kabupaten Probolinggo adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak di lereng pegunungan yang membujur dari barat ke timur yaitu Gunung Semeru, Argopuro, Lamongan, dan Tengger. Selain itu terdapat gunung lainnya, yaitu Gunung Bromo, Widdodaren, Gilap, Gambir, Jombang, Cemoro Lawang, Malang, dan Batujajar. Kabupaten Probolinggo telah menerima alokasi PRIM Tahun 2019-2021. PRIM Kabupaten Probolinggo telah mendapatkan Hibah dari Pemerintah Australia dari tahun 2019 melalui Perjanjian Penerusan Hibah yang ditanda tangani oleh Bupati Probolinggo dan Dirjen Perimbangan Keuangan pada bulan Desember 2018 sebesar Rp 70 miliar. Pelaksanaan Hibah Australia dengan mekanisme pembiayaan pendahuluan dan untuk kemudian dimintakan penggantian sesuai hasil verifikasi Pekerjaan oleh Team Teknis Kementerian PUPR. Hibah tersebut untuk membiayai kegiatan konstruksi/fisik dengan porsi hibah sampai dengan 40% dan selebihnya menjadi porsi APBD. Sedangkan hibah juga dialokasikan untuk insentif institusi dalam rangka peningkatan kapasitas, persiapan program, survei kondisi jalan, desain dan kegiatan institusi lainnya yang dilaksanakan oleh 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hibah tersebut direncanakan dilaksanakan 3 tahun dari 2019-2021, namun karena adanya pandemi Covid-19, maka anggaran infrastruktur di Kabupaten Probolinggo terkena refocusing anggaran sehingga pada posisi 31 Desember 2021 total hibah yang terserap senilai Rp 54.182.477.424 dan saldo sisa hibah Rp. 15.817.522.576 namun sesuai kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dan Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian PUPR perlu adanya antisipasi exchange rate dari AUD ke Rupiah sehingga diusulkan rencana penyerapan Hibah PRIM 2022 sebesar Rp 15.300.000.000,-.

Justifikasi perpanjangan hibah dari Pemerintah Australia adalah untuk mendukung penyelesaian peningkatan kondisi jalan di koridor menuju Bromo-Tengger-Semeru yang belum tuntas akibat adanya refocusing anggaran tahun 2020-2021. Perpanjangan koridor untuk mendukung pembangunan Jembatan Kaca di Seruni Point, maka diperlukan rehabilitasi Jalan ruas Ngadisari-Seruni Point. Adapun program yang terkait Pembangunan Jembatan Kaca di Seruni Point adalah sebagai berikut:

- Koridor Ngadisari-Seruni Point sepanjang 3,2 Km penanganan mencakup rehabilitasi jalan, perlengkapan jalan, trotoar, penerangan jalan umum, drainase, pemeliharaan jalan dan jembatan.

- Penanganan koridor tersebut diatas untuk mendukung Pembangunan Jembatan Kaca di Seruni Point yang saat ini dalam pelaksanaan konstruksi oleh Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ditjen Bina Marga Tahun Anggaran 2021-2022 dengan nilai kontrak Rp. 15,71 miliar.

- Peningkatan dan perbaikan Kawasan inlet, outlet, parkir, sarana dan prasarana wisatawan di Jembatan Kaca yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya Tahun Anggaran 2022



PRIM KABUPATEN PROBOLINGGO

Secara keseluruhan ruas-ruas jalan yang ditangani dengan panjang 99 Km dengan uraian sebagai berikut

Penanganan Ruas Jalan dan Rencana Anggaran

Paket	Sumber Dana	Ruas Jalan	Nama Ruas	Panjang (Km)	Pemeliharaan	Jumlah harga pekerjaan pemeliharaan + pelebaran (Rp Juta)
P1	PRIM	1	Tongas - Lumbang	13.2	PR + RK	1,048.2
P1	PRIM	105	Lumbang - Madakaripura	7.3	PB + PR + RK	3,085.5
E-Catalog	PRIM	107	Pesisir - Sumur Mati	2.5	PR + RK	100.4
E-Catalog	PRIM	11	Bantaran - Kuripan	5.6	PR + RK	446.2
E-Catalog	PRIM	12	Patokan - Patalan	4.7	PR + RK	352.3
E-Catalog	PRIM	13	Kuripan - Sumber	6.3	PR + RK	1,120.4
E-Catalog	PRIM	19	Leces - Bantaran	7.1	PR + RK	618.5
P2	PRIM	2	Lambang Kuning - Sapih	11.2	REH + PR + RK	18,407.4
E-Catalog	PRIM	20	Jetak - Wonotoro	0.7	PR + RK	408.3
P3	PRIM	25	Ngadisari - Laut Pasir	3.9	PR + RK	1,655.1
P2	PRIM	3	Lumbang - Lambang Kuning	3.3	PR + RK	612.9
E-Catalog	PRIM	446	Jl. Yos Sudarso	1.7	PR + RK	318.6
E-Catalog	PRIM	464	Jl. Pasar Sukapura	0.6	PR + RK	1,284.1
P3	PRIM	466	Jl. Ngadisari/Ke Seruni Point	3.2	REH + PR + RK	8,777.7
E-Catalog	PRIM	469	Jl. Wonokerto	0.5	PR + RK	1,361.4
P3	PRIM	5	Sukapura - Ngadisari	13.1	PR + RK	1,555.6
P3	PRIM	6	Ngadisari - Cemoro Lawang	1.6	PR + RK	69.1
P2	PRIM	60	Sukapura - Lambang Kuning	2.9	PR + RK	639.0
E-Catalog	PRIM	9	Wonoasih - Bantaran	7.8	PR + RK	452.5
E-Catalog	PRIM	99	Sepuh gembol - Pohsangit Tengah	2.2	PR + RK	186.3
				99.3		42,499.2

Berdasarkan hasil pelaksanaan pekerjaan Program PRIM di Kabupaten Probolinggo, diperoleh hasil kinerja 2020-2022 adalah sebagai berikut :

Realisasi Pekerjaan PRIM di Kabupaten Probolinggo

Tahun	Kabupaten Probolinggo						Pemenuhan Ouput Institusi (%)	
	Keuangan			Fisik				
	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Presentase Realisasi (%)	Target (Km)	Realisasi (Km)	Presentase Realisasi (%)		
2020	Rp630.002	Rp547.837	85%	86,32	86,32	100%	99%	
2021	Rp900.000	Rp778.788	84%	86,07	84,62	98,32%	99%	
2022	Rp500.000	Rp387.169	80%	104,84	97,20	92,71%	79%	
Total	Rp.2.030.002	Rp.1.713.794	83%	277,23	268,14	97%	92,3%	

*) Target dan realisasi fisik terdiri atas pekerjaan:

- Pemeliharaan Rutin;
- Pemeliharaan Berkala ;
- Rehabilitasi, dan;
- Pelebaran.

2.3 PHJD/PRIM FASE III

TAHUN 2021 – 2023

2.3.1 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba merupakan salah satu major project Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. KSPN Danau Toba merupakan sebuah danau vulkanik dengan ukuran panjang 100 kilometer dan lebar 30 kilometer yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Danau ini merupakan danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Di tengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanik bernama Pulau Samosir. Danau Toba sejak lama menjadi daerah tujuan wisata penting di Sumatera Utara. Suasana sejuk menyegarkan, hamparan air jernih membiru, dan pemandangan mempesona pegunungan hijau adalah sebagian kecil saja dari imaji danau raksasa yang berada 900 meter di atas permukaan laut itu.

Potensi pariwisata ini menjadikan Danau Toba terpilih sebagai salah satu KSPN PHJD yang diikuti oleh :

- Provinsi Sumatera Utara
- Kabupaten Simalungun
- Kabupaten Humbang Hasundutan



A. PROVINSI SUMATERA UTARA

Sebagai daerah penerima Program Hibah Jalan Daerah, Provinsi Sumatera Utara mendapatkan alokasi Tahun 2021 Rp 44.000.000.000, Tahun 2022 Rp 59.479.000.000, Tahun 2023 Rp 66.627.938.000, alokasi tersebut sesuai dengan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Kementerian Keuangan yang setiap tiga tahun diterima oleh pemerintah daerah. Adapun realisasi Program Hibah Jalan Daerah di Provinsi Sumatera Utara, yaitu :

Provinsi Sumatera Utara							
Tahun	Keuangan			Fisik			Pemenuhan Output Institusi (%)
	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Presentase Realisasi (%)	Target (Km)	Realisasi (Km)	Presentase Realisasi (%)	
2021	Rp44.000	Rp38.258	87%	32.70	32.70	100%	84%
2022	Rp59.479	Rp49.890	84%	85.43	71.71	84%	65%
2023	Rp66.628	Rp61.203	92%	42.59	34.90	82%	85%
Total	Rp170.107	Rp149.351	88%	160.72	139.31	87%	78%

*) Target dan realisasi fisik terdiri atas pekerjaan:

- Pemeliharaan Rutin;
- Pemeliharaan Berkala ;
- Rehabilitasi, dan;
- Pelebaran.



B. KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Sebagai daerah penerima Program Hibah Jalan Daerah, Kabupaten Humbang Hasundutan mendapatkan alokasi Tahun 2021 Rp 22.000.000.000, Tahun 2022 Rp 14.000.000.000, Tahun 2023 Rp 21.900.655.000, alokasi tersebut sesuai dengan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Kementerian Keuangan yang setiap tiga tahun diterima oleh pemerintah daerah. Adapun ruas jalan yang dikerjakan melalui Program Hibah Jalan Daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan, yaitu :

- Pargaulan - Bahal Imbal - Bts. Taput
- Sigumpar - Pearung - Sipinsur
- Onan Raja - Pearung
- Sibuntuon - Panoguan Solu - Bts. Taput
- Pasar Lama - Parulohan - Pasar Baru
- Doloksanggul - Aek Lung
- Marbun Toruan - Tombak Sulu-sulu - Sp. Siunong-unong
- Aek Lung - Simariguung
- Htapaung - Pollung
- Pollung - Sp. Batu Mardinding (Baktiraja)

Kabupaten Humbang Hasundutan							
Tahun	Keuangan			Fisik			Pemenuhan Ouput Institusi (%)
	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Presentase Realisasi (%)	Target (Km)	Realisasi (Km)	Presentase Realisasi (%)	
2021	Rp22.000	Rp500	2%	52.06	1.34	3%	29%
2022	Rp14.000	Rp12.081	86%	39.77	34.31	86%	91%
2023	Rp21.901	Rp21.755	99%	60.58	60.59	100%	93%
Total	Rp57.901	Rp34.336	59%	152.41	96.24	63%	71%

*) Target dan realisasi fisik terdiri atas pekerjaan:

- Pemeliharaan Rutin;
- Pemeliharaan Berkala ;
- Rehabilitasi, dan;
- Pelebaran.



C. KABUPATEN SIMALUNGUN

Sebagai daerah penerima Program Hibah Jalan Daerah, Kabupaten Simalungun mendapatkan alokasi Tahun 2021 Rp 22.000.000.000, Tahun 2022 Rp 14.000.000.000, Tahun 2023 Rp 18.771.657.000, alokasi tersebut sesuai dengan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Kementerian Keuangan yang setiap tiga tahun diterima oleh pemerintah daerah.

Adapun ruas jalan yang dikerjakan melalui Program Hibah Jalan Daerah di Kabupaten Simalungun yaitu :

- Pargaulan - Bahal Imbal - Bts. Taput
- Sigumpar - Pearung - Sipinsur
- Onan Raja - Pearung
- Sibuntuon - Panoguan Solu - Bts. Taput
- Pasar Lama - Parulohan - Pasar Baru
- Doloksanggul - Aek Lung
- Marbun Toruan - Tombak Sulu-sulu - Sp. Siunong-unong
- Aek Lung – Simariguung
- Htapaung – Pollung
- Pollung - Sp. Batu Mardinding (Baktiraja)

Kabupaten Simalungun							
Tahun	Keuangan			Fisik			Pemenuhan Ouput Institusi (%)
	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Presentase Realisasi (%)	Target (Km)	Realisasi (Km)	Presentase Realisasi (%)	
2021	Rp22.000	Rp1.102	5%	45.47	0.00	0%	25%
2022	Rp14.000	Rp12.799	91%	32.23	29.48	91%	56%
2023	Rp18.772	Rp18.043	96%	37.46	24.79	66%	56%
Total	Rp54.772	Rp31.945	58%	115.16	54.27	47%	46%

*) Target dan realisasi fisik terdiri atas pekerjaan:

- Pemeliharaan Rutin;
- Pemeliharaan Berkala ;
- Rehabilitasi, dan;
- Pelebaran.



2.3 PHJD/PRIM FASE III TAHUN 2021 – 2023

2.3.2 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur



Provinsi Jawa Tengah tak hanya menawarkan keajaiban dunia, di sini kita juga bisa menemukan beraneka ragam objek wisata lainnya yang tidak kalah menarik. Di sekitar candi, terdapat tiga museum yang bisa kunjungi untuk menambah wawasan, yaitu Museum Borobudur, Museum Kapal Samudraraksa, dan Museum MURI. Jika kita ingin melihat pemandangan luar biasa Candi Borobudur dari kejauhan, maka wajib hukumnya untuk mendatangi Punthuk Setumbu yang berlokasi di bagian barat Candi Borobudur. Di sini, kita juga bisa menyaksikan indahnya matahari terbit atau terbenam di masing-masing ufuk.

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur merupakan salah satu major project Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, candi yang sangat megah dan rupawan ini telah dikenal oleh wisatawan lokal maupun mancanegara sebagai kuil Buddha terbesar di dunia. Wajar saja, karena Candi Borobudur memiliki luas sekitar 2500 meter persegi, dengan panjang 121,66 meter, lebar 121,38 meter, dan tinggi 35,40 meter.



A. PROVINSI JAWA TENGAH

Sebagai daerah penerima Program Hibah Jalan Daerah, Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi Tahun 2021 Rp 44.000.000.000, Tahun 2022 Rp 49.905.000.000, Tahun 2023 Rp 56.556.782.000, alokasi tersebut sesuai dengan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Kementerian Keuangan yang setiap tiga tahun diterima oleh pemerintah daerah.

Adapun ruas jalan yang dikerjakan melalui Program Hibah Jalan Daerah di Provinsi Jawa Tengah, yaitu :

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| •Batur – Dieng | •Bener – Maron |
| •Dieng – Kejajar | •Salaman – Borobudur |
| •Kejajar – Wonosobo | •Magelang – Salaman |
| •Kertek – Kepil | •Sapuram – Kaliangkrik |
| •Maron – Purworejo | •Magelang – Kaliangkrik |
| •Maron – Kemiri | •Blondo – Mendut |
| •Kemiri – Kepil | •Blabak – Jrakah |
| •Salaman – Bener | •Boyolali – Jrakah |

Tahun	Provinsi Jawa Tengah						
	Keuangan			Fisik			Pemenuhan Ouput Institusi (%)
	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Presentase Realisasi (%)	Target (Km)	Realisasi (Km)	Presentase Realisasi (%)	
2021	Rp44.000	Rp42.132	96%	164.15	164.15	100%	99%
2022	Rp49.905	Rp49.412	99%	89.70	88.81	99%	99%
2023	Rp56.557	Rp54.496	96%	98.28	98.09	100%	98%
Total	Rp150.462	Rp146.039	97%	352.13	351.06	100%	98%

*) Target dan realisasi fisik terdiri atas pekerjaan:

- Pemeliharaan Rutin;
- Pemeliharaan Berkala ;
- Rehabilitasi, dan;
- Pelebaran.



B. KABUPATEN WONOSOBO

Sebagai daerah penerima Program Hibah Jalan Daerah, Kabupaten Wonosobo mendapatkan alokasi Tahun 2021 Rp 22.000.000.000, Tahun 2022 Rp 31.501.000.000, Tahun 2023 Rp 35.582.112.000, alokasi tersebut sesuai dengan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Kementerian Keuangan yang setiap tiga tahun diterima oleh pemerintah daerah.

Adapun ruas jalan yang dikerjakan melalui Program Hibah Jalan Daerah di Kabupaten Wonosobo yaitu :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| •Bener – Maron | •Batur – Dieng |
| •Salaman – Borobudur | •Dieng – Kejajar |
| •Magelang – Salaman | •Kejajar – Wonosobo |
| •Sapuram – Kaliangkrik | •Kertek – Kepil |
| •Magelang – Kaliangkrik | •Maron – Purworejo |
| •Blondo – Mendut | •Maron – Kemiri |
| •Blabak – Jrakah | •Kemiri – Kepil |
| •Boyolali – Jrakah | •Salaman – Bener |

Kabupaten Wonosobo							
Tahun	Keuangan			Fisik			Pemenuhan Output Institusi (%)
	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Presentase Realisasi (%)	Target (Km)	Realisasi (Km)	Presentase Realisasi (%)	
2021	Rp22.000	Rp21.276	97%	37.32	37.32	100%	90%
2022	Rp31.501	Rp31.056	99%	37.72	37.19	99%	80%
2023	Rp35.582	Rp35.170	99%	33.73	32.49	96%	90%
Total	Rp89.083	Rp87.502	98%	108.77	107.00	98%	87%

*) Target dan realisasi fisik terdiri atas pekerjaan:

- Pemeliharaan Rutin;
- Pemeliharaan Berkala ;
- Rehabilitasi, dan;
- Pelebaran.



2.3 PHJD/PRIM FASE III TAHUN 2021 – 2023

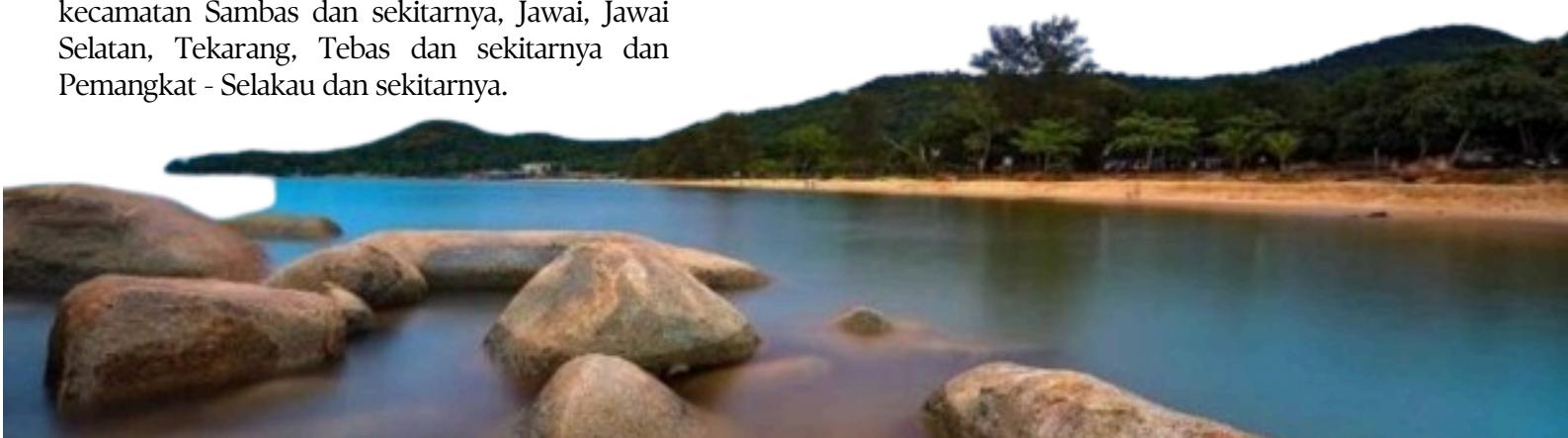


2.3.3 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Sambas

Kabupaten Sambas memiliki luas wilayah 6.395,70 km² atau 639.570 ha, Panjang Pantai ±128,5 km dan Panjang perbatasan negara ± 97 km. Kabupaten Sambas menjadi salah satu Kabupaten di Kalimantan Barat yang dikembangkan menjadi destinasi wisata. Wisata Bahari dan wisata budaya menjadi andalan Kabupaten Sambas. Menurut Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sambas, kawasan pariwisata di Kabupaten Sambas dikelompokan menjadi 4 kawasan, yaitu Aruk - Temajuk dan sekitarnya, Pusat kota / kecamatan Sambas dan sekitarnya, Jawai, Jawai Selatan, Tekarang, Tebas dan sekitarnya dan Pemangkat - Selakau dan sekitarnya.

Pariwisata yang ada di KSPN Sambas antara lain:

1. Konservasi Penyu Pantai Tanjung Api;
2. Ekowisata Mangrove di Desa Sebubus;
3. Danau sebedang di Kecamatan Tebas;
4. Taman Wisata Bahari di Desa Jawai Laut;
5. Komplek Istana Alwatzikobillah;
6. Camar Bulan Resort;
7. Grab Village;
8. Teluk Atong;
9. Pantai Camar Bulan;
10. JLO Resort;
11. Pantai batu Nenek.



A. PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Sebagai daerah penerima Program Hibah Jalan Daerah, Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan alokasi Tahun 2021 Rp 44.000.000.000, Tahun 2022 Rp 55.814.000.000, Tahun 2023 Rp 58.148.175.000, alokasi tersebut sesuai dengan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Kementerian Keuangan yang setiap tiga tahun diterima oleh pemerintah daerah.

Adapun ruas jalan yang dikerjakan melalui Program Hibah Jalan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :

- Jalan Gusti Hamzah (dalam kota Sambas)
- Jalan Ahmad Marzuki (dalam kota Sambas)
- Jalan Sultan Safiuddin (dalam kota Sambas)
- Jalan Pembangunan (dalam kota Sambas)
- Simpang Bantan I - Simp. Bantan II (Sange Mange)
- Simpang Tanjung Harapan - Tanah Hitam
- Tanah Hitam - Merbau

Provinsi Kalimantan Barat							
Tahun	Keuangan			Fisik			Pemenuhan Ouput Institusi (%)
	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Presentase Realisasi (%)	Target (Km)	Realisasi (Km)	Presentase Realisasi (%)	
2021	Rp44.000	Rp43.412	99%	57.90	57.90	100%	85%
2022	Rp55.814	Rp55.758	100%	71.81	71.74	100%	99%
2023	Rp58.148	Rp57.884	100%	62.44	57.59	92%	95%
Total	Rp157.962	Rp157.054	99%	192.15	187.23	97%	93%

*) Target dan realisasi fisik terdiri atas pekerjaan:

- Pemeliharaan Rutin;
- Pemeliharaan Berkala ;
- Rehabilitasi, dan;
- Pelebaran.



B. KABUPATEN SAMBAS

Sebagai daerah penerima Program Hibah Jalan Daerah, Kabupaten Sambas mendapatkan alokasi Tahun 2021 Rp 22.000.000.000, Tahun 2022 Rp 32.618.000.000, Tahun 2023 Rp 35.412.681.000, alokasi tersebut sesuai dengan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Kementerian Keuangan yang setiap tiga tahun diterima oleh pemerintah daerah.

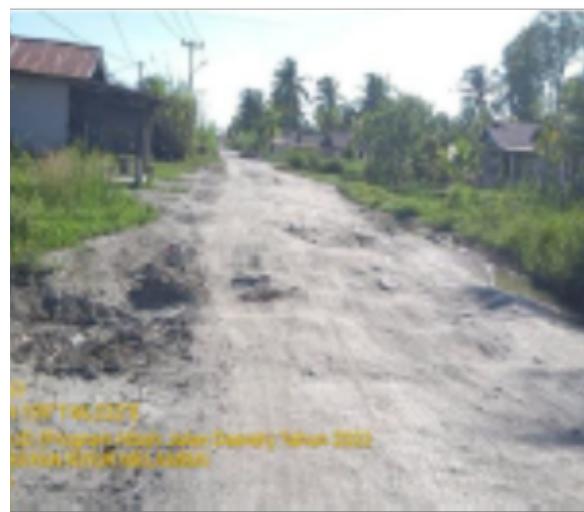
Adapun ruas jalan yang dikerjakan melalui Program Hibah Jalan Daerah di Kabupaten Sambas yaitu :

- Ruas Jalan Sei Batang-Pinang Merah;
- Ruas Jalan Simpang Empat-Tanah Hitam;
- Ruas Jalan Sejangkung-Kembayat;
- Ruas Jalan Sekura – Rambayan;
- Ruas Jalan Rambayan – Nyiur melambai;
- Ruas Jalan Sekura – Teluk Kalong;
- Ruas Jalan Parit Baru – Mekar Sekuntum;
- Ruas Jalan Semparuk – Bentunai.

Tahun	Keuangan			Fisik			Pemenuhan Output Institusi (%)
	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Presentase Realisasi (%)	Target (Km)	Realisasi (Km)	Presentase Realisasi (%)	
2021	Rp22.000	Rp21.912	100%	56.30	56.30	100%	96%
2022	Rp32.618	Rp22.235	68%	87.87	59.94	68%	84%
2023	Rp35.413	Rp26.107	74%	94.34	86.19	91%	94%
Total	Rp90.031	Rp70.253	78%	238.51	202.43	85%	91%

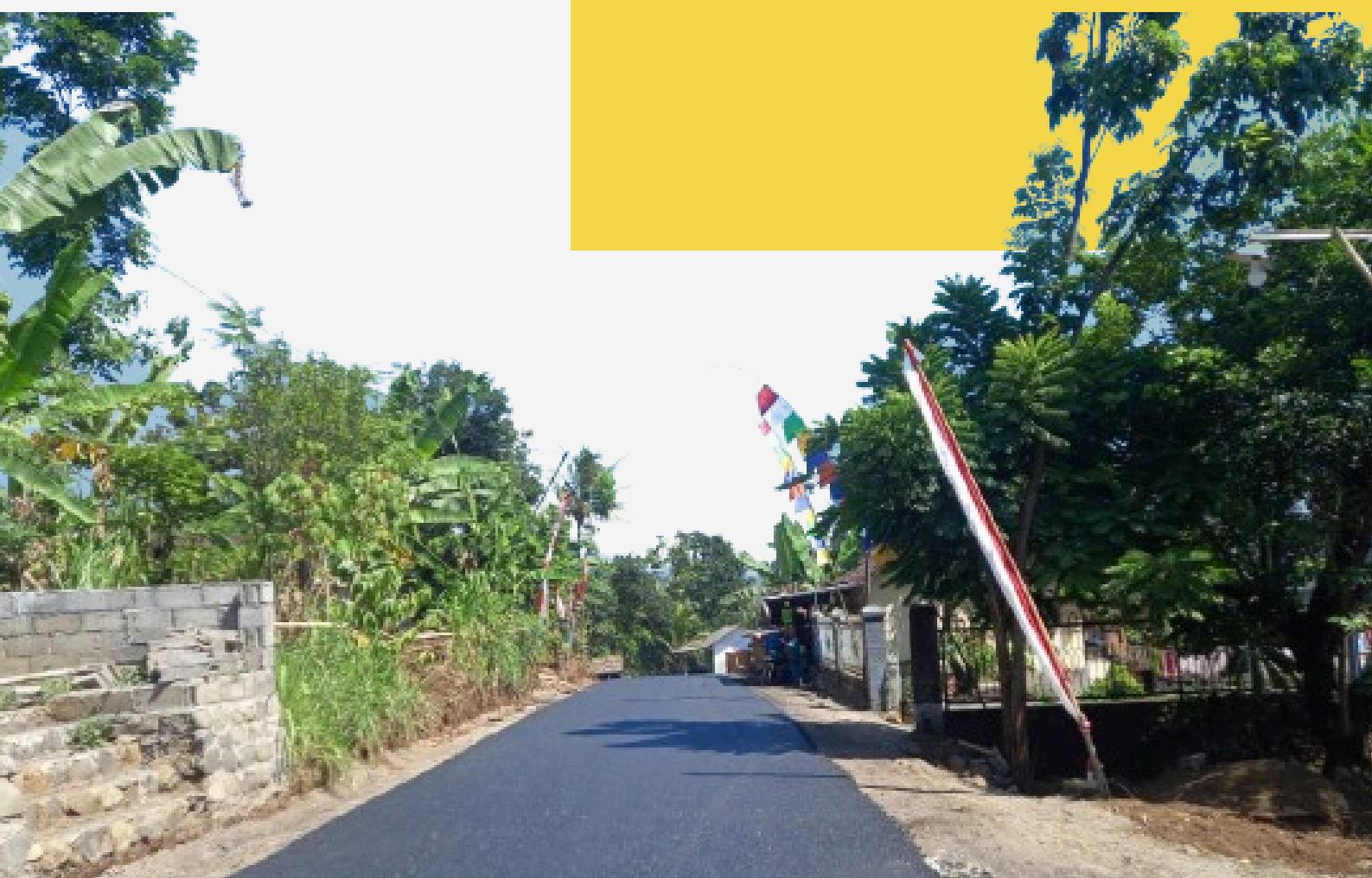
*) Target dan realisasi fisik terdiri atas pekerjaan:

- Pemeliharaan Rutin;
- Rehabilitasi/Rekonstruksi



BAB III

DAMPAK PHJD



Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) adalah skema yang dibentuk oleh pemerintah pusat secara khusus untuk mendukung pengembangan infrastruktur jalan daerah, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan.

3.1 DAMPAK PHJD PADA KOMPONEN TEKNIS

Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) adalah skema yang dibentuk oleh pemerintah pusat secara khusus untuk mendukung pengembangan infrastruktur jalan daerah, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan. Berdasarkan Program Management Manual (PMM) Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) Amandemen 4 Tahun 2021 menyebutkan jenis penanganan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah penerima alokasi yaitu mencakup :

- 1) Pemeliharaan Rutin (Backlog and Minor Works /BMW/Rutin Kondisi, Backlog Minimum/Holding Treatment),
- 2) Pemeliharaan berkala jalan, dan
- 3) Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan.

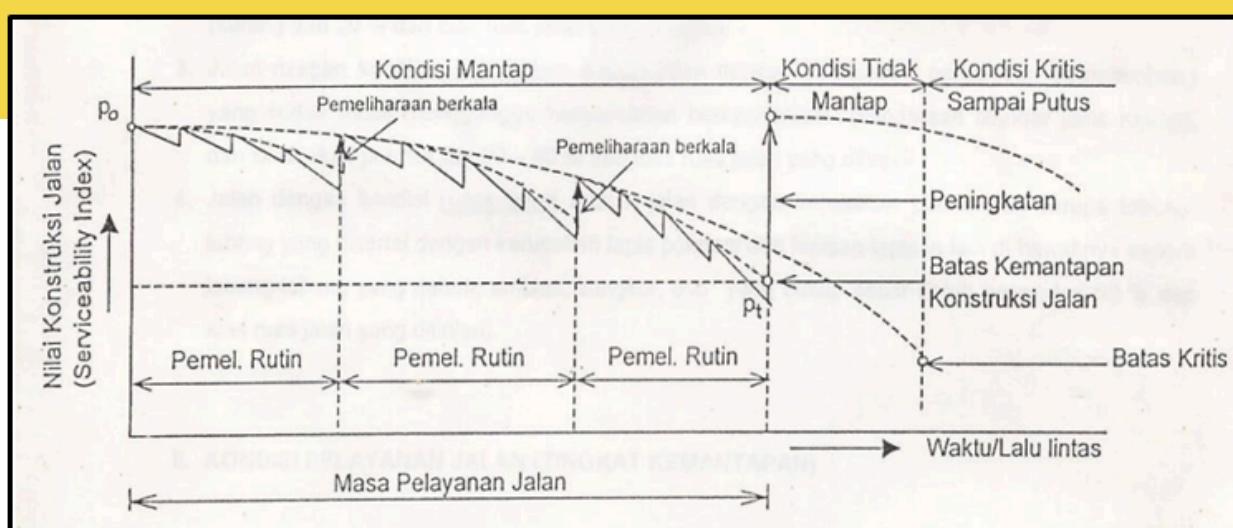


Diagram Nilai Konstruksi Jalan (Serviceability Index) versus Masa Pelayanan Jalan

Berbeda dengan skema pembiayaan infrastruktur lainnya, PHJD menerapkan konsep longsegmen. Sesuai Surat Edaran Dirjen Bina Marga No.09/SE/Db/205 longsegmen adalah konsep penanganan preservasi jalan dalam batasan satu panjang segmen yang menerus untuk mendapatkan kondisi jalan yang seragam yaitu jalan mantap dan seragam sepanjang segmen yang terdiri dari komponen pekerjaan sebagai berikut :

1

PEMELIHARAAN RUTIN

Pemeliharaan Rutin merupakan pekerjaan pemeliharaan aset jalan yang dilakukan setiap tahun berupa pekerjaan preventif (pencegahan) dan pekerjaan reaktif (penanganan) terhadap lapis permukaan, bahu jalan, drainase jalan dan bangunan pelengkap jalan berupa:

- Pemeliharaan/Pembersihan Bahu Jalan;
- Pemeliharaan Sistem Drainase;
- Pemeliharaan/Pembersihan Ruang Manfaat Jalan (Rumaja);
- Pemeliharaan Pemotongan Tumbuhan/Tanaman Liar Di Dalam Ruang Manfaat Jalan (Rumaja);
- Pemeliharaan Perkerasan Jalan (Sealing, Laburan, Penambalan);
- Pemeliharaan Bangunan Pelengkap;
- Pemeliharaan Perlengkapan Jalan;
- Grading Operation/Reshaping atau pembentukan kembali permukaan untuk perkerasan jalan tanpa penutup dan jalan tanpa perkerasan
- Pemeliharaan Lereng;
- Pekerjaan Darurat.

2

PEMELIHARAAN BERKALA

Pemeliharaan berkala merupakan aktivitas pekerjaan yang melindungi keutuhan permukaan jalan dan dilakukan dalam interval beberapa tahun, jenis pekerjaan ini dilakukan sebagai respon atas kerusakan kondisi jalan dan membantu mengurangi kerusakan struktur jalan berupa pekerjaan sebagai berikut:

- Pelapisan Ulang (Overlay);
- Perbaikan Bahu Jalan;
- Pelapisan Aspal Tipis, termasuk pemeliharaan pencegahan;
- Pengasaran Permukaan (Regrooving);
- Pengisian Celah/Retak Permukaan (Sealing);
- Perbaikan Bangunan Pelengkap;
- Penggantian/Perbaikan Perlengkapan Jalan yang Hilang/Rusak;
- Permarkaan (Marking) Ulang;
- Penambalan Lubang;
- Untuk jalan yang tidak berpenutup aspal/beton semen dapat dilakukan penggarukan, penambahan, dan pencampuran kembali material pada saat pembentukan kembali permukaan;
- Pemeliharaan/pembersihan rumaja.

3

REHABILITASI/REKONSTRUKSI

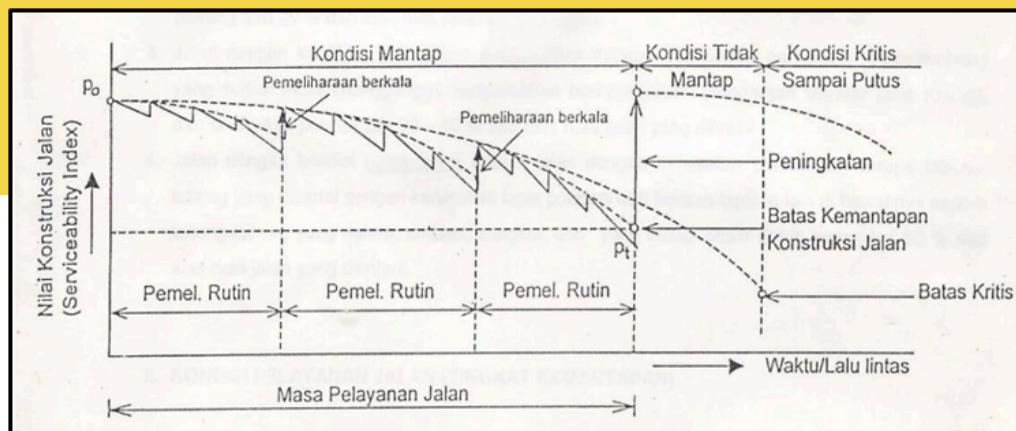
Rehabilitasi merupakan kegiatan tidak direncanakan atau dilakukan diluar rencana karena timbulnya kerusakan akibat hal-hal diluar dugaan seperti bencana alam atau tidak dilaksanakannya pemeliharaan rutin atau berkala dengan tujuan mengembalikan jalan ke keadaan semula agar tetap berfungsi. Kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jalan adalah sebagai berikut :

- Pelapisan Ulang;
- Perbaikan Bahu Jalan;
- Perbaikan Bangunan Pelengkap;
- Perbaikan/Penggantian Perlengkapan Jalan;
- Penambalan Ulang;
- Penggantian Dowelltie Bar Pada Perkerasan Kaku (Rigid Pavement)
- Penanganan Tanggap Darurat;
- Pekerjaan Galian
- Pekerjaan Timbunan;
- Penyiapan Tanah Dasar;
- Pekerjaan Struktur Perkerasan;
- Perbaikan/Pembuatan Drainase;
- Pemarkaan;
- Pengkerikilan Kembali (regraveling) untuk perkerasan jalan tidak berpenutup dan jalan tanpa perkerasan;
- Pemeliharaan/Pembersihan Rumaja;
- Pelebaran Jalan dalam rangka pemenuhan standar dengan syarat tanah sudah dibebaskan.

3.2 DAMPAK PHJD PADA KOMPONEN NON-TEKNIS

Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) adalah skema yang dibentuk oleh pemerintah pusat secara khusus untuk mendukung pengembangan infrastruktur jalan daerah, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan. Berdasarkan Program Management Manual (PMM) Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) Amandemen 4 Tahun 2021 menyebutkan jenis penanganan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah penerima alokasi yaitu mencakup :

- 1) Pemeliharaan Rutin (Backlog and Minor Works /BMW/Rutin Kondisi, Backlog Minimum/Holding Treatment),
- 2) Pemeliharaan berkala jalan, dan
- 3) Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan.



Gambar 3.1 Diagram Nilai Konstruksi Jalan (Serviceability Index) versus Masa Pelayanan Jalan

3.2 DAMPAK PHJD PADA KOMPONEN NON-TEKNIS

Sejak pemerintah pusat menetapkan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) sebagai salah satu skema pembiayaan infrastruktur jalan daerah, pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik infrastruktur namun juga pembangunan sumber daya manusia melalui tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui beberapa kegiatan seperti Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ), Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Pelatihan PKRMS, dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang mendukung infrastruktur jalan daerah.

A. Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ)

Pembangunan infrastruktur jalan tidak terlepas dari aspek keselamatan jalan. Pertimbangan aspek keselamatan jalan dilakukan untuk rehabilitasi jalan, pemeliharaan berkala, dan Backlog and Minor Works (BMW). Pengkajian keselamatan jalan dilakukan pada tahap penyiapan DED, konstruksi jalan, maupun sebelum serah terima sementara/PHO (Provisional Hand Over).

C. Pelatihan Provincial/Kabupaten Road Management System (PKRMS)

Provincial/Kabupaten Road Management System (P/KRMS) adalah alat bantu yang didesain khusus untuk keperluan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran (PPP) yang dapat digunakan di tingkat Provinsi atau Kabupaten.

B. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Kesetaraan gender menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah pusat sejak tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional dan Keputusan Menteri PUPR No.134/KPTS/M/2011 tentang Pembentukan PUG Kementerian PUPR serta peraturan terkait lainnya.

D. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan sebagai upaya preventif dan mitigasi terhadap infrastruktur di kawasan pariwisata yang terbentuk dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

A. FORUM LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (FLLAJ)



Pembangunan infrastruktur jalan tidak terlepas dari aspek keselamatan jalan. Pertimbangan aspek keselamatan jalan dilakukan untuk rehabilitasi jalan, pemeliharaan berkala, dan Backlog and Minor Works (BMW). Pengkajian keselamatan jalan dilakukan pada tahap penyiapan DED, konstruksi jalan, maupun sebelum serah terima sementara/PHO (Provisional Hand Over). Dalam penanganan pekerjaan jalan harus memenuhi kaidah keselamatan jalan diantaranya perlengkapan jalan namun tidak terbatas pada rambu, marka, pagar pengaman (guard rail), dan patok pengarah (guide post) melainkan lalu lintas dan angkutan jalan juga merupakan suatu kondisi yang perlu penanganan tersendiri. Hal ini menjadi perhatian dari PHJD wajib dibentuk Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ). Forum ini berfungsi untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas jalan. Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) menghasilkan beberapa output yaitu,

1. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang FLLAJ

Dalam rangka mendukung kegiatan FLLAJ dibutuhkan situs yang bersifat independen dan memuat beberapa fitur yang menjadi media penyampaian aspirasi bagi masyarakat mengenai permasalahan di sektor transportasi. Melalui kolom laporan tersebut masyarakat dapat melakukan pelaporan baik kritik, saran, masukan, kejadian kecelakaan maupun permasalahan lainnya. Situs FLLAJ ini digunakan sebagai media komunikasi dan transparasi atas kegiatan penanganan infrastruktur jalan yang menjadi salah satu output keluaran Program Hibah Jalan Daerah

2. Situs FLLAJ yang Independen

Pembentukan Surat Keputusan (SK) FLLAJ digunakan sebagai dasar hukum pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini juga ditetapkan sebagai salah satu output institusi PHJD yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah pada saat verifikasi PHJD dilaksanakan.

No.	Provinsi/Kabupaten	Alamat Situs FLLAJ
1.	Prov. Kep. Bangka Belitung	https://fllaj.babelprov.go.id/
2.	Kab. Belitung	https://fllaj.belitung.go.id/
3.	Prov. Jawa Timur	https://fllaj.jatimprov.go.id/
4	Kab. Malang	https://www.fllajkabmalang.site/
5.	Kab. Pasuruan	https://forumllajkabpasuruan.or.id/

No.	Provinsi/Kabupaten	Alamat Situs FLLAJ
6.	Kab.Lumajang	https://fllaj.lumajangkab.go.id/
7.	Prov. Sulawesi Tenggara	https://fllaj.sultraprov.go.id/article/sosialisasi-sop-fllaj-prov-sultra
8.	Kab.Wakatobi	https://www.dishubllaj.wakatobikab.go.id/
9.	Prov.NTT	https://dishub.nttprov.go.id/
10.	Kab. Manggarai Barat	https://perhubungan.manggaraibaratkab.go.id/
11.	Prov. Sumatera Barat	https://fllaj.sumbarprov.go.id/
12.	Kab. Pesisir Barat	https://fllaj.pesisirselatankab.go.id/
13.	Prov. Sulawesi Selatan	http://www.forumllajprovsulsel.com/
14.	Kab. Tana Toraja	https://fllaj.tanatorajakab.go.id/
15.	Kab. Toraja Utara	https://torajautarakab.go.id/
16.	Prov. Jawa Tengah	https://fllaj.jatengprov.go.id/
17.	Kab. Wonosobo	https://fllaj.wonosobokab.go.id/
18.	Prov. Sumatera Utara	https://dishub.sumutprov.go.id/
19.	Kab. Humbang Hasundutan	https://humbanghasundutankab.go.id/
20.	Kab. Simalungun	https://fllajsimalungun.com/
21.	Prov. Kalimantan Barat	https://www.fllaj.kalbarprov.go.id
22.	Kab. Sambas	https://fllaj.sambas.go.id/

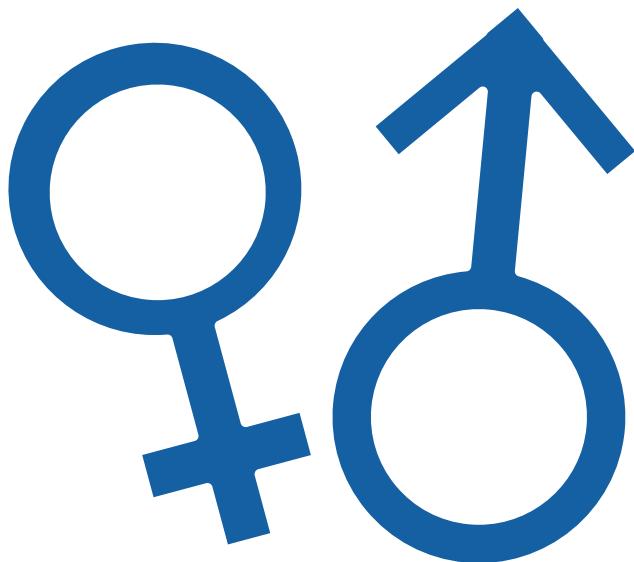
3. Sosialisasi CoST dan SOP FLLAJ

Pemerintah daerah didorong untuk mengadakan sosialisasi Construction Sector Transparency (CoST), hal ini perlu dilakukan untuk mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan meningkatkan kesadaran untuk transparansi dan akuntabilitas dalam infrastruktur publik.

4. Pembuatan Peta Lokasi Rawan Kecelakaan/Blackspot Berbasis SIG

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem yang dirancang untuk bekerja dengan data tereferensi secara spasial atau koordinat. Peta ini dibutuhkan untuk menggambarkan lokasi rawan kecelakaan beserta informasinya. Komponen peta lokasi rawan bencana ini penting dalam pengembangan jalan, khususnya untuk pengadaan marka, rambu, dan komponen pengaman jalan lainnya.

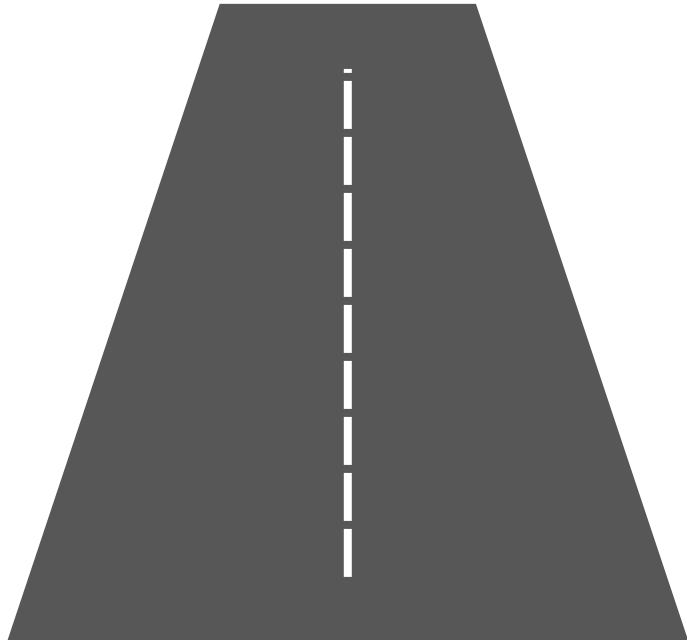
B. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG)



Pengarustamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan termasuk anak-anak, pemuda, lansia, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok rentan lainnya secara adil dan setara. Adapun PPRG mendorong pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur jalan dengan memperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut:

- Jalan dapat dimanfaatkan oleh semua individu. Penyelenggaraan infrastruktur jalan harus dapat dimanfaatkan oleh perempuan dan laki-laki termasuk anak-anak, remaja, lansia, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya;
- Jalan yang berkeselamatan, aman, dan nyaman. Infrastruktur jalan harus memberikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi perempuan dan laki-laki dengan penerangan jalan yang baik, bebas banjir, desain bangunan yang aman, dan desain trotoar yang bebas halangan

Kesetaraan gender menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah pusat sejak tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional dan Keputusan Menteri PUPR No.134/KPTS/M/2011 tentang Pembentukan PUG Kementerian PUPR serta peraturan terkait lainnya. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu dan perpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social budaya, pertahanan, dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

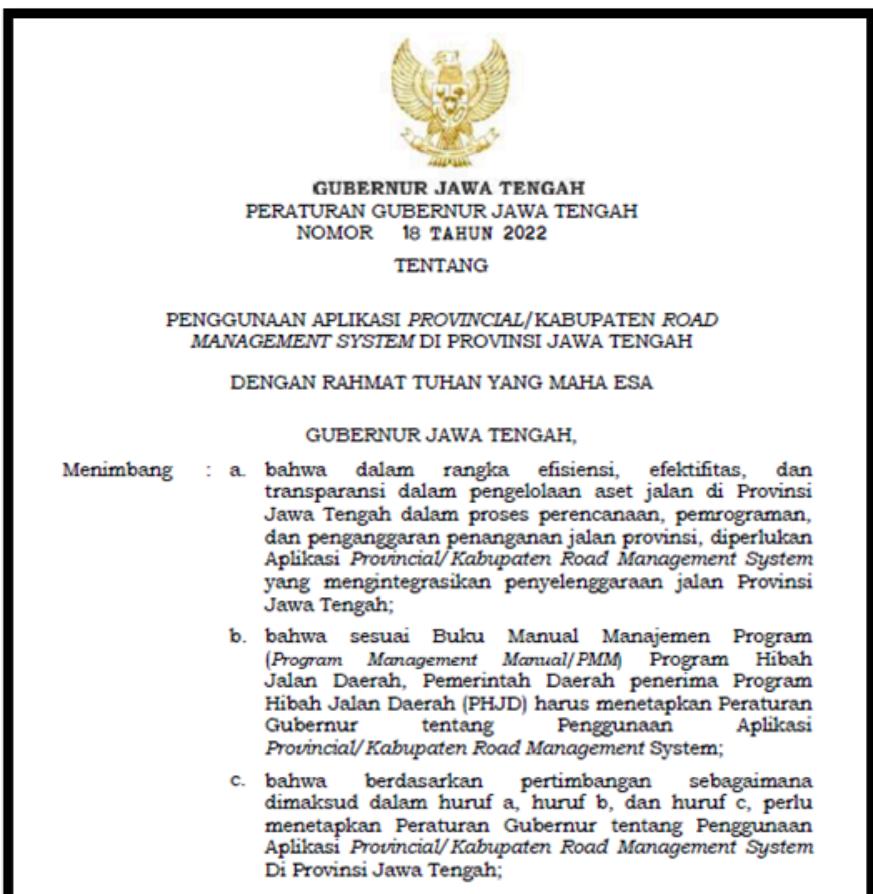


- Penyelenggaraan jalan daerah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan bagi perempuan, laki-laki, anak-anak, remaja, lansia, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya;
- Jalan yang mengedepankan kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan kebutuhan dasar;

C. PELATIHAN PROVINCIAL/KABUPATEN ROAD MANAGEMENT SYSTEM (PKRMS)

Provincial/Kabupaten Road Management System (P/KRMS) adalah alat bantu yang didesain khusus untuk keperluan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran (PPP) yang dapat digunakan di tingkat Provinsi atau Kabupaten. P/KRMS berperan sebagai sumber database utama dan alat analisis untuk keperluan perencanaan yang menampung data kondisi, inventarisasi, data proyek, sejarah jalan, dan peta. Alat bantu ini diberikan untuk menjadi milik provinsi atau kabupaten yang dapat digunakan sebagai alat bantu PPP bidang jalan

Pemerintah daerah penerima PHJD telah menggunakan P/KRMS secara bertahap dimulai dari ruas-ruas PHJD hingga saat ini seluruh ruas telah disurvei dan dianalisis menggunakan P/KRMS. Sebagai dasar penggunaan P/KRMS pemerintah daerah juga telah menetapkan peraturan daerah terkait penggunaan aplikasi P/KRMS. Dalam proses penggunaan P/KRMS diperlukan pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis kepada personil yang ditugaskan sebagai petugas administrator dan analisis maupun pelaksana survei lapangan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapabilitas.



Sistem P/KRMS berfungsi juga untuk proses penganggaran yang obyektif dengan menyusun proyeksi biaya berdasarkan norma standar yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, biaya antar proyek dapat dibandingkan dan membantu mengidentifikasi efisiensi yang dapat dicapai melalui prioritisasi ulang atau identifikasi segmen panjang atau penanganan tahun jamak. Posisi P/KRMS dalam siklus PPP diantaranya yaitu :

- Database jalan (ruas jalan, inventaris dan kondisi jalan, lalu lintas harian rata-rata, track GPS ruas jalan);
- Mengolah dan menganalisa data jalan;
- Menentukan prioritas pekerjaan (pemeliharaan rutin, backlog and minorwork, rehabilitasi)
- Pelaporan tentang kondisi jalan

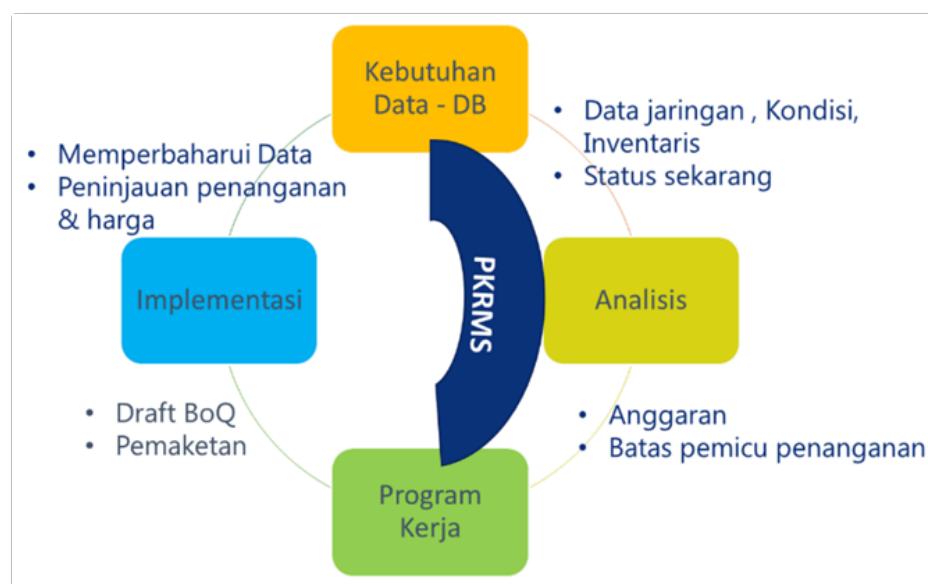
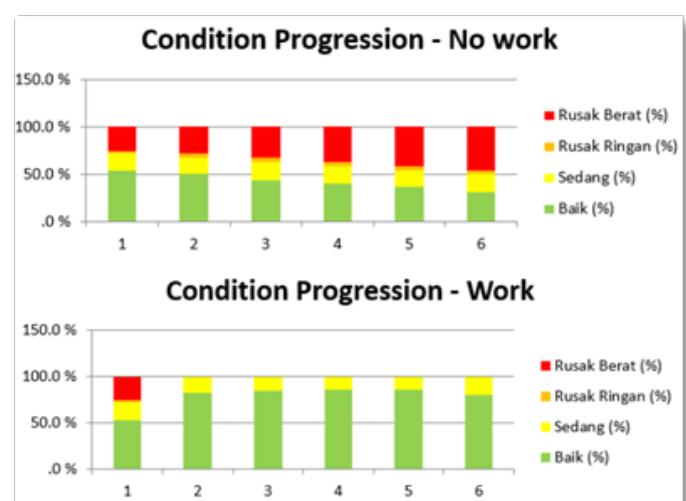
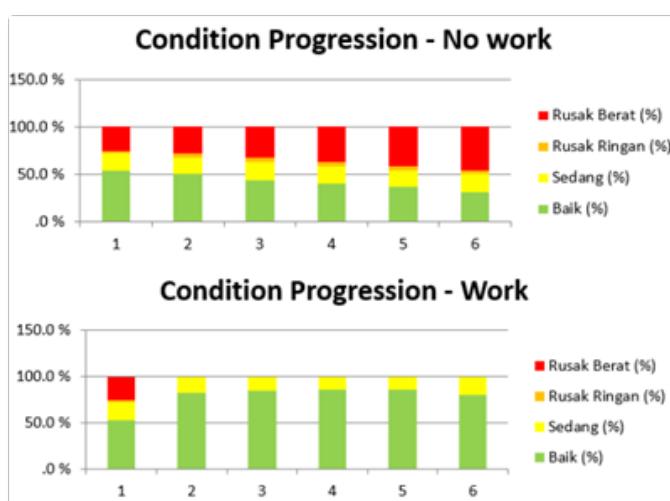


Diagram Posisi P/KRMS Pada Proses Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran



Contoh Keluaran P/KRMS Untuk Laporan Analisis Proyeksi Kondisi Jalan

Programming

Deskripsi Analisis: PHNJD

Pilih Ruas: 053 - Dingklik - Penanjakan

Km dari	Km ke	Panjang (m)	Perkerasan Kom.	Tahun 1	Pemeliharaan	Tahun 2	Pemeliharaan	Tahun 3	Pemeliharaan	Tahun 4	Pemeliharaan	Tahun 5	Pemeliharaan	Widening required	
0	200	200	Asphalt		Routine	99		0							
200	400	200	Asphalt		Routine	99		0							
400	600	200	Asphalt		Routine	99		0							
600	800	200	Asphalt		Periodic	2		143							
800	1000	200	Asphalt		Periodic	1		143							
1000	1200	200	Asphalt		Periodic	1		143							
1200	1400	200	Asphalt		Periodic	2		143							
1400	1600	200	Asphalt		Periodic	2		143							
1600	1800	200	Asphalt		Periodic	2		143							
1800	2000	200	Asphalt		Periodic	2		143							
2000	2200	200	Asphalt		Periodic	2		143							
2200	2400	200	Asphalt		Periodic	2		143							
2400	2600	200	Asphalt		Periodic	2		143							
2600	2800	200	Asphalt		Periodic	3		143							
2800	3000	200	Asphalt		Periodic	3		143							
3000	3200	200	Asphalt		Periodic	2		143							
3200	3400	200	Asphalt		Rehabilitation	1		622							
3400	3600	200	Asphalt		Rehabilitation	1		622							
3600	3800	200	Asphalt		Rehabilitation	1		622							
3800	4000	200	Asphalt		Rehabilitation	1		622							
4000	4100	100	Asphalt		Rehabilitation	1		311							

Segmen yang Dipilih
Dari 0 Ke 0 Terapkan Nilai

Bagi Lokasi (m)
Bagi Segmen Kembali ke Awal

Refresh

	Total Harga (Rp Juta)					
	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Berkala						0
Rehabilitasi						0
Peningkatan Struktur						0
Penunjang						0
Total	0	0	0	0	0	0
Anggaran MW	16,000	5,000	5,000	5,000	5,000	36,000
Rutin						0
TOTAL HARGA	0	0	0	0	0	0
TOTAL ANGARAN	25,875	6,206	6,204	6,224	6,235	50,744

	Total Km					
	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Berkala						
Rehabilitasi						
Peningkatan Struktur						
Penunjang						
Total	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Contoh Keluaran P/KRMS Untuk Pemrograman

D. KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)

Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) berfokus untuk meningkatkan kemantapan jalan pada Kawasan Strategis Nasional (KSN) khususnya pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Pengembangan pariwisata tidak hanya dari sisi fisik atau infrastruktur saja namun pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan sebagai upaya preventif dan mitigasi terhadap infrastruktur di kawasan pariwisata yang terbentuk dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) merupakan hal fundamental dalam mengembangkan desa wisata di suatu daerah, khususnya pada daerah KSPN, hal ini karena dalam pembentukan suatu desa atau kawasan wisata dibutuhkan sosok penggerak yang mengkoordinir keberlanjutan dari program daerah wisata tersebut.

Pokdarwis dibentuk oleh masyarakat dan dikembangkan oleh masyarakat dalam rangka melestarikan daya tarik wisata di daerah, dengan hadirnya Pokdarwis dapat membantu melakukan pemetaan potensi, sosialisasi, dan promosi desa dan kawasan wisata dengan memanfaatkan media yang ada. Selain berfungsi sebagai promotor kawasan wisata. Program Hibah Jalan Daerah mendorong keterlibatan publik dalam pengembangan infrastruktur jalan, khususnya di kawasan pariwisata. Peran Pokdarwis dalam PHJD untuk memberikan rekomendasi dan evaluasi atas infrastruktur jalan di kawasan KSPN. Infrastruktur jalan yang menuju ke arah wisata maupun simpul transportasi membutuhkan perhatian khusus, oleh karena itu Pokdarwis selaku penggerak wisata di daerah bertugas dalam perencanaan dan evaluasi pengembangan infrastruktur di kawasan pariwisata.



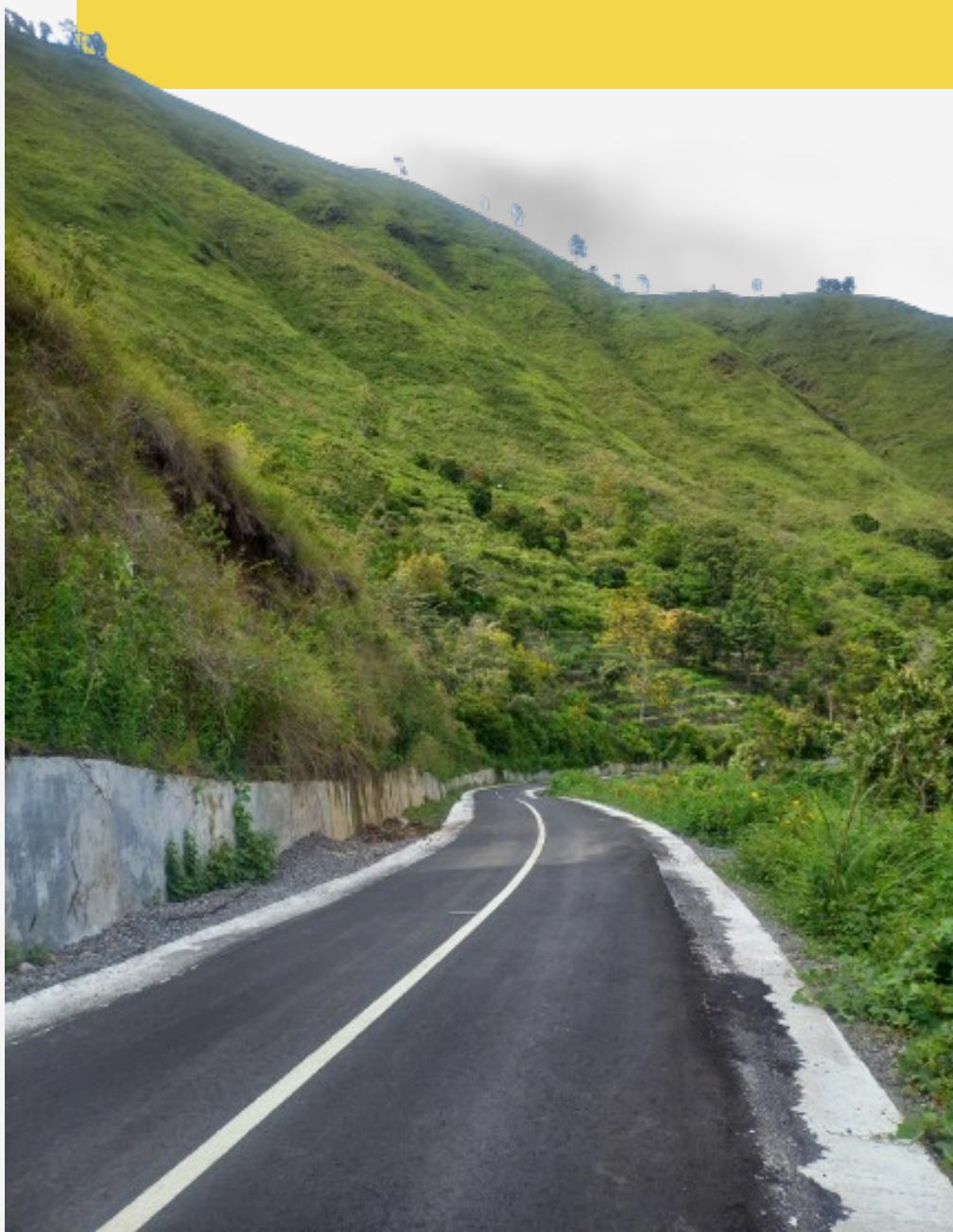
Contoh Kegiatan Pembinaan Pokdarwis di Provinsi Jawa Tengah

BAB IV

KESIMPULAN

DAN SARAN

Sepanjang pelaksanaan PHJD/PRIM terdapat sejumlah pembelajaran dan hambatan pelaksanaan. Untuk itu, dalam bab ini disampaikan beberapa saran untuk pelaksanaan program serupa kedepannya



4.1 KESIMPULAN



TAHAP PERENCANAAN

Pada sisi perencanaan, khususnya pada penetapan daerah penerima alokasi telah dilaksanakan dengan sistematis dimana Kementerian PPN, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PUPR mengacu pada RJMN sehingga fokus utama dari PHJD adalah untuk meningkatkan kemantapan jalan daerah di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Khusus untuk Kabupaten Sambas yang berada di kawasan perbatasan termasuk dalam KSN namun karena jumlah destinasi wisata dan terdapat peningkatan jumlah wisatawan, oleh karena itu Kabupaten Sambas termasuk dalam daerah KSPN PHJD. Berdasarkan data Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas, terdapat 90 destinasi pariwisata salah satu yang menjadi tujuan favorit wisatawan adalah Pantai Temajuk dan Pantai Batu Nenek. Selain itu terdapat peningkatan jumlah wisatawan sebesar 16,18% dari tahun 2022 ke tahun 2023. Akan tetapi, pemerintah pusat tidak menyampaikan dalam bukti tertulis atas penetapan lokasi Kabupaten Sambas selaku KSPN. Hal ini yang selanjutnya dapat menjadi poin perbaikan dari sisi perencanaan pemerintah pusat untuk PHJD selanjutnya.

TAHAP IMPLEMENTASI

Tahap kedua PHJD adalah implementasi yang terbagi dalam empat tahapan yaitu Pelaksanaan Pra-Verifikasi, Verifikasi, Permintaan Pencairan, dan Penyaluran Hibah dengan rincian sebagai berikut :

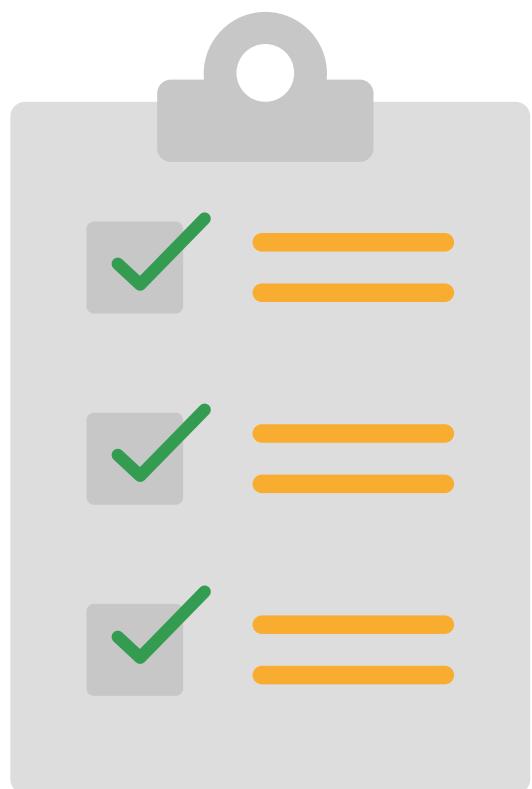


Tahapan	Hambatan
Pra-Verifikasi PIU/Dinas PU dibantu oleh Konsultan Pendamping/PIC melakukan pengawasan terhadap hasil pekerjaan konsultan supervisi dan melakukan evaluasi/review atas hasil laporan kemajuan pekerjaan secara periodik.	Pemerintah daerah tidak melakukan koordinasi yang baik dengan konsultan pendamping terkait data progres pekerjaan.
Verifikasi Penghitungan nilai output untuk penggantian dana hibah dengan menggunakan Nilai Acuan Pekerjaan (NAP) atau Reference Unit Cost (RUC) yang dilakukan dalam 3 tahap yaitu Tahap I (Maret-April), Tahap II (Juli), dan Tahap III (November).	<ul style="list-style-type: none">Minimnya koordinasi antar-OPD di daerah menyebabkan tidak maksimalnya pemenuhan output institusi yang telah ditetapkan dalam PMM PHJD;Keterbatasan jaringan internet di daerah;Pemerintah daerah tidak secara optimal memenuhi output institusi pada saat verifikasi dilaksanakan.
Permintaan Pencairan Pemerintah Provinsi/Kabupaten mengajukan pencairan hibah kepada DJPK Kementerian Keuangan.	Beberapa pemerintah daerah masih terlambat menyampaikan Surat Permohonan Pencairan Hibah PHJD ke DJPK Kementerian Keuangan
Penyaluran Hibah Penyaluran dana hibah PHJD dilakukan melalui mekanisme APBN dan APBD dan diatur dalam PHD sesuai dengan PP No.2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan PMK No.107/2023 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Daerah Tahun Anggaran 2023	Sehubungan dengan masih terdapat pemerintah daerah yang terlambat menyampaikan Surat Permohonan Pencairan Hibah PHJD ke DPJK, proses penyaluran hibah juga terhambat.

TAHAP EVALUASI

Pasca pelaksanaan implementasi PHJD, tahap terakhir adalah evaluasi. Mekanisme pelaporan, pemantauan evaluasi hibah dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam PHD dan sesuai peraturan perundang-undangan terkait hibah daerah dan tata cara penyaluran hibah kepada pemerintah daerah. Adapun pelaporan dilampirkan secara triwulan dengan komponen Laporan kemajuan pekerjaan, Laporan tingkat kemantapan jalan sesuai format PKRMS, Laporan Penggunaan Dana Hibah, Laporan Penyerapan Dana, Laporan akhir kegiatan, dan Dokumen pendukung terkait. Selanjutnya pemerintah pusat bertugas untuk melakukan evaluasi atas beberapa poin yaitu :

- Kinerja FLLAJ dan perannya dalam kegiatan pengelolaan jalan serta mendorong tingkat partisipasi/keterlibatan masyarakat;
- Jumlah wisatawan yang dating, lama waktu tinggal yang bermuara pada peningkatan pendapatan pemerintah daerah dari sektor pariwisata;
- Panjang ruas jalan/koridor dan tingkat kemantapan jalan yang sudah dicapai oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan jumlah panjang jalan/koridor yang harus ada dan target kemantapan jalan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah;
- Kemajuan yang dicapai pemerintah daerah berkenaan dengan pinjaman perbankan, baik melalui skema Peraturan Presiden No 29 Tahun 2009 atau skema perbankan umum;
- Kemajuan yang dicapai pemerintah daerah berkenaan dengan rencana kerja sama dengan swasta.



APA SAJA DAMPAK PHJD/PRIM ?

Penyelenggaraan Program PHJD di pemerintah daerah penerima memberikan dampak bagi pemerintah daerah. Terdapat pembelajaran, pencapaian target, sinergitas antar institusi untuk mereplikasi dan melanjutkan tata kelola pada metode pembiayaan lainnya. Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR melalui Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah telah melakukan evaluasi serta menginventaris dampak atas Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) pada daerah penerima, adapun dampak dari kegiatan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah
- b) Mendorong tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik
- c) Meningkatkan capaian target indikator program kemantapan jalan di daerah.
- d) Meningkatkan kapasitas institusi baik secara individu maupun organisasi.
- e) Mendorong kesadaran pemerintah daerah atas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- f) Penggunaan PKRMS membantu proses penyelenggaraan jalan menjadi lebih terstruktur dan terukur sehingga pelaksanaan menjadi lebih optimal.
- g) Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program Gender Equality and Social Inclusion (GESI) yang menuntut keterlibatan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan menjadi salah satu nilai tambah dalam pelaksanaan program ini. Kegiatan ini memberikan masukan bagi pemerintah daerah untuk selalu melibatkan gender dan penyandang disabilitas untuk aktif terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah
- h) Keberadaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) mendukung partisipasi berbagai pihak dalam mendorong iklim yang kondusif bagi perkembangan pariwisata, termasuk dalam pengembangan infrastruktur jalan di daerah kawasan pariwisata. Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat serta transparansi dalam pengadaan infrastruktur dasar jalan daerah.



4.2 SARAN

Kegiatan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) 2019-2023 dapat membantu percepatan pembangunan jalan daerah. Program ini juga menciptakan perbaikan yang nyata pada jaringan jalan di daerah. Proses pelaksanaan berlangsung efisien dan mendapat dukungan luas dari masyarakat. Penyelenggaraan program ini memberikan dampak positif baik dalam meningkatkan aksesibilitas maupun kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Namun ada hal-hal penting lainnya yang dapat menjadi masukan dalam penyelenggaraan program tersebut diantaranya yaitu:

- Pemerintah daerah penerima PHJD diharapkan dapat lebih disiplin dalam penyampaian Rencana Tahunan serta Surat Kepala Daerah sebagai syarat penyaluran nilai pengantian;
- Perlu ditingkatkannya koordinasi antar Institusi yang terlibat PHJD dalam rangka pemenuhan output institusi yang berdampak pada pemenuhan nilai insentif;
- Pemerintah daerah penerima PHJD wajib meningkatkan kapasitas pemahaman Manual Manajemen Program (PMM) PHJD khususnya terkait dengan pekerjaan fisik yang mendapatkan nilai pengantian (re-imbursement);
- Pada tahap awal program diharapkan sudah dilakukan pengadaan tenaga konsultan pendamping maupun tenaga konsultan asessmen dalam rangka persiapan perencanaan fisik pemerintah daerah agar meminimalisir kesalahan;
- Pemerintah daerah perlu menandatangani pakta integritas yang menyatakan komitmen atas PHJD.



RUPPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

